

**KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENDAMPINGAN
TEKNOLOGI TEPAT GUNA DI DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KOTA JAMBI**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1)
Dalam Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Syariah**



**Oleh :
MUHAMMAD NAUFAL ALFIKRI
NIM: 105180058**

**Pembimbing:
Dr. Yuliatin, S.Ag., M.H.I
Yudi Armansyah, S.Th.I., M.Hum**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS SYARIAH
NIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
JAMBI
1444 H / 2023**

@ Hak cipta milik UIN Sultha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

**KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENDAMPINGAN
TEKNOLOGI TEPAT GUNA DI DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KOTA JAMBI**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1)
Dalam Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Syariah**



Oleh :
MUHAMMAD NAUFAL ALFIKRI
NIM: 105180058

Pembimbing:
Dr. Yuliatin, S.Ag., M.H.I
Yudi Armansyah, S.Th.I., M.Hum

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS SYARIAH
NIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
JAMBI
1444 H / 2023**

@ Hak cipta milik UIN Sultha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Naufal Alfikri
NIM : 105180058
Jurusan : Ilmu Pemerintahan
Fakultas : Syariah
Alamat : Perumahan Puri Masurai Blok C.22 RT.43 Kelurahan Talang
bakung Kecamatan Paal Merah Kota Jambi

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi yang berjudul: **“KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENDAMPINGAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA DI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA JAMBI”** adalah hasil karya saya pribadi yang tidak mengandung plagiarisme dan tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan secara ilmiah.

Apabila pernyataan ini tidak benar, maka penulis siap mempertanggung jawabkannya sesuai hukum yang berlaku dan ketentuan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, termasuk pencabutan gelar yang saya dapatkan dari skripsi ini.

Jambi, Juli 2022



Muhammad Naufal Alfikri
NIM. 1051800758



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Jambi – Ma. Bulian KM. 16 Simp. Sei Duren – Jambi 36363 Telp (0741) 582021
Telp/Fax (0741) 583183-584118 Website: iainjambi.ac.id

PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi yang berjudul “Kebijakan Pemerintah Dalam Pendampingan Teknologi Tepat Guna Di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi” telah diujikan pada Sidang Munaqasah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada tanggal 8 Mei 2023. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Ilmu Pemerintahan.

Jambi, Mei 2023

Mengesahkan:

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Saifulana, S.Ag., MH
NIP. 197201022000031005

Panitia Ujian	
Ketua Sidang	: <u>Dr. Rasito, SH.,M.Hum</u> NIP. 196503211998031003
Sekretaris Sidang	: <u>Dra. Choiriyah</u> NIP. 196605081994032001
Penguji I	: <u>Wenny Destina, M.SI</u> NIP. 197801092005012006
Penguji II	: <u>Imam Arifa'illah Syaiful Huda, M.Sc</u> NIP. 199302152019031013
Pembimbing I	: <u>Dr. Yuliatin, S.Ag., M.H.I</u> NIP. 197407182000032002
Pembimbing II	: <u>Yudi Armansyah, M.Hum</u> NIP. 198606062015031007

()
()
()
()
()
()

MOTTO

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ
فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Artinya :*”Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar”*.¹



¹ Al-Qur'an Surah An-Nisa [4:9]

PERSEMBAHAN

Allhamdulillahirobil'Alamin Dengan Rahmat Allah SWT yang maha kuasa yang telah melimpahkan segala kenikmatan dan kasih sayang-Nya dalam kehidupan saya. Dan tak lupa pula Rasulullah SAW yang telah membawa umatnya ke dunia yang penuh ilmu seperti sekarang ini serta menjadi contoh dan panutan yang sangat baik dalam memberikan petunjuk kepada umat manusia. Dengan ini saya persembahkan hasil karya tulis saya kepada orang-orang yang telah memberikan cinta, perhatian dan motivasi dalam menuntut ilmu yakni Pertama dan paling utama kedua orang tua saya, Ibuku tersayang Suwairini yang telah memberikan perhatian dan kasih sayang yang tak terhingga, dan terimakasih kepada Ayahku tersayang Nuryakhman terimakasih banyak atas kasih sayang, pengertian dan perjuangmu yang selama ini saya jadikan motivasi untuk terus dapat menyelesaikan apapun yang telah saya mulai, Yang kedua terimakasih untuk adikku tersayang Ulfi Isnaini.

Terima kasih banyak kuucapkan, hanya karya tulis ini yang baru dapatku persembahkan untuk kalian. Semoga Allah SWT membalas jasa budi kebaikan semua dikemudian hari dan diberikan kenikmatan, kebahagiaan serta kemudahan dalam menjalani hidup. Aamiin...

ABSTRAK

Skripsi Ini adalah hasil penelitian yang memberikan gambaran terkait bagaimana kebijakan pemerintah dalam pendampingan teknologi tepat guna di Kota Jambi, Teknologi tepat guna adalah Teknologi yang hadir sebagai jembatan antara teknologi tradisional dan teknologi modern. Pemberdayaan masyarakat melalui teknologi tepat guna merupakan salah satu pilihan yang tepat agar masyarakat mampu berdaya dengan dukungan faktor teknologi. yang melatar belakangi penulis melakukan penelitian terhadap judul ini karena penulis melihat masih ada beberapa masalah yang dihadapi seperti masyarakat yang belum memahami Teknologi Tepat Guna dan bahwa sudah adanya regulasi oleh pemerintah tentang kegiatan Teknologi Tepat Guna itu, masalah yang lain yang dihadapi yaitu bagaimana terlaksanakannya kebijakan Teknologi Tepat Guna dari dinas pemberdayaan masyarakat itu. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif yaitu Metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Dari penelitian yang dilakukan, Hasil yang penulis dapatkan yaitu Pertama dinas terkait dalam melakukan pendampingan teknologi tepat guna melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang direalisasikan dalam Instruksi Presiden No.3 Tahun 2001 tentang Penerapan dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna. Kedua dalam Keegiatannya pemerintah dari Dinas pemberdayaan masyarakat Kota yang merealisasikan regulasi kegiatan teknologi tepat guna, melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat serta melakukan pendampingan. Ketiga untuk terlaksananya kebijakan dalam pendampingan teknologi tepat guna dinas pemberdayaan masyarakat membuat sasaran untuk melakukan pengembangan inovasi alat Teknologi Tepat Guna. Kesimpulan yang dapat penulis jelaskan disini yaitu dinas pemberdayaan masyarakat kota jambi telah melakukan upaya pengembangan masyarakat melalui Teknologi Tepat Guna. sehingga masyarakat mampu membangun diri dan lingkungannya secara mandiri melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat.

Kata Kunci: Kebijakan, Teknologi, Pemberdayaan Masyarakat.

ABSTRACT

This Thesis is the result of research that provides an overview of how government policies in assisting appropriate technology in Jambi City, Appropriate technology is technology that is present as a bridge between traditional technology and modern technology. Community empowerment through appropriate technology is one of the right choices so that people are able to be empowered with the support of technological factors. which is the background of the author conducting research on this title because the author sees that there are still several problems faced such as people who do not understand Appropriate Technology and that there have been regulations by the government regarding Appropriate Technology activities, another problem faced is how to implement the Appropriate Technology policy from the community empowerment office. The research method used in this study is qualitative method, namely data collection method through observation, interview and document From the research conducted, the results that the author obtained were First, the relevant agencies in assisting appropriate technology to carry out their duties in accordance with the provisions realized in Presidential Instruction No.3 of 2001 concerning the Application and Development of Appropriate Technology. Second in its activities the government from the City community empowerment office that realizes regulations on appropriate technology activities, conducts socialization activities to the community and conducts accompaniment. Third, for the implementation of policies in appropriate technology assistance, the community empowerment office makes targets to develop innovative Appropriate Technology tools. The conclusion that the author can explain here is that the Jambi City Community Empowerment Office has made community development efforts through Appropriate Technology. So that the community is able to build themselves and their environment independently through increasing the knowledge and skills of the community

Keywords: community empowerment, policy, technology.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya semoga kita senantiasa berada dalam lindungan-Nya. Teriring salam dan Şalawat pada junjungan Rasulullah SAW dan Keluarga yang dicintainya beserta sahabat-sahabatnya, sehingga skripsi yang berjudul **“KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENDAMPINGAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA DI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA JAMBI”** ini, dapat penulis selesaikan dengan baik dan tepat waktu. Penulis menyusun skripsi ini sebagai karya ilmiah yang merupakan persyaratan memperoleh gelar sarjana (S1) pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultah Thaha Saifuddin Jambi.

Penulis sangatlah menyadari bahwa di dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi teknik penulisan maupun dari segi isinya. Walaupun demikian penulis telah berusaha semaksimal mungkin agar inti dari skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca di kemudian hari. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, terutama kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr.H.Su’aidi Asy’ari, MA.,Ph.D., selaku Rektor UIN STS Jambi.
2. Bapak Dr. Sayuti, Una S.Ag.,M.H., selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN STS Jambi.
3. Bapak Agus Salim, S.Th.I, M.A, M.I.R., Ph.D, Bapak Dr. Ruslan Abdul Gani, SH., M.Hum., dan Bapak Dr. H. Ishaq, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I, II, III di lingkungan Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
4. Ibu Dr. Irmawati Sagala, S.IP. M.Si, MHSH., selaku Ketua Program Studi Ilmu

Pemerintahan, dan Bapak Yudi Armansyah, M.Hum selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Pemerintahan

5. Ibu Dr. Yuliatin, S.Ag., M.H.I selaku Pembimbing Skripsi I dan Bapak Yudi Armansyah, S. Th.I., M.Hum selaku Pembimbing Skripsi II, yang selama ini telah membantu segala urusan yang ada di fakultas dan banyak membantu penulis dalam rangka memberikan arahan, petunjuk dalam penyusunan skripsi.
6. Bapak dan Ibu dosen, asisten dosen dan seluruh karyawan dan karyawan Fakultas Syari'ah UIN STS Jambi.
7. Karyawan dan Karyawan Perpustakaan UIN STS Jambi dan Fakultas Syariah
8. Terima kasih kepada sahabat, teman serta semua pihak yang ikut membantu penulisan skripsi ini yang tidak dapat penulis tuliskan satu persatu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini masih sederhana dan jauh dari kata sempurna, karena keterbatasan data dan pengetahuan yang dimiliki oleh penulis. Untuk itu penulis menghargai kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak terhadap skripsi ini. Kepada Tuhan ku Allah SWT, hamba memohon ampunan atas semua kesalahan yang ada di dalam skripsi ini, semoga amal kebaikan kita dinilai seimbang oleh Allah SWT.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini juga dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya untuk mahasiswa serta seluruh yang membaca skripsi ini.

Jambi, Juli 2022

Muhammad Naufal Alfikri
NIM. 105180058

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
PENGESAHAN	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR SINGKATAN	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Batasan Masalah	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
E. Metode Penelitian	9
F. Tinjauan Pustaka	16
G. Jadwal Penelitian	20
BAB II	21
KERANGKA TEORI	21
A. Kerangka Teoritis dan Konseptual	21
1. Kerangka Teoritis	21
2. Kerangka Konseptual	26
BAB III	32
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	32
A. Historis dan Geografis	32



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

@ Hak cipta milik UIN Sunha Jambi

State Islamic University of Sultthan Thaha Saifuddin Jambi

B. Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Jambi	37
C. Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi	37
D. Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan anak kota jambi dan Posyantek Ojo Lali Jelutung	39
BAB IV	41
PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	41
A. Syarat dan Ketentuan Dalam Pendampingan Teknologi Tepat Guna pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi	41
B. Regulasi Pendampingan Teknologi Tepat Guna Masyarakat Kota Jambi.....	50
C. Kebijakan Pendampingan Teknologi Tepat Guna pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi	61
BAB V.....	67
PENUTUP.....	67
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN.....	72

DAFTAR SINGKATAN

1. TTG : Teknologi Tepat Guna
2. POSYANTEK: Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna
3. WARTEK : Warung Teknologi Tepat Guna
4. RENSTRA : Rencana Strategis
5. PPMK : Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
6. RPJMD : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
7. RENJA : Rencana Kerja
8. IPTEK : Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
9. DPMPPA : Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Data alat TTG Kota Jambi	4
Tabel 2 Jadwal Penelitian.....	20
Tabel 3 Pemberdayaan Masyarakat Teknologi Tepat Guna	57

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Letak Geografi.....	36
Gambar 2 Struktur Organisasi DPMPPA.....	39
Gambar 3 Struktur Organisasi Posyantek	40
Gambar 4 Alat pengolah limbah menjadi pupuk organik	63
Gambar 5 Pupuk Organik	66

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan merupakan suatu proses terencana guna menciptakan suatu perubahan kearah yang lebih baik dengan cepat, serta dapat memberikan berbagai macam perubahan kemajuan dalam segala bidang aspek bagi masyarakat. Dalam hal ini Pembangunan hendaknya juga memperhatikan kualitas sumber daya manusianya, dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) diharapkan agar individu setiap masyarakat menjadi lebih mandiri dengan keterampilan yang dimiliki, dengan begitu secara tidak langsung akan membantu mereka keluar dari masalah-masalah sulit yang dihadapi.²

Teknologi adalah pengetahuan yang digunakan untuk membuat barang, menyediakan jasa serta meningkatkan cara dalam menangani sumber daya yang penting dan terbatas. Pengertian lain dari teknologi adalah upaya manusia untuk membuat kehidupan lebih sejahtera, lebih baik, lebih enak dan lebih mudah. Teknologi telah dikembangkan dengan tujuan untuk membuat hidup lebih baik, efisien dan mudah.³

Teknologi adalah indikator penting dalam bagian kehidupan yang tidak dapat dipisahkan Dalam lingkungan masyarakat. pemanfaatan teknologi sangat penting dalam menunjang efisiensi, memudahkan pekerjaan dan memberi nilai tambah pada

² Riza Fauziah, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna (Posyantek)", *Skripsi*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2020), hlm. 1.

³ Mira Rusmalinta, *Skripsi: "Dampak Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam Pertanian Terhadap Perubahan Sosial Keagamaan Masyarakat Petani"*, (Lampung: UIN Raden Intan, 2021), hlm. 15.

produk yang dihasilkan. Namun pada umumnya, teknologi diasumsikan pada seperangkat alat yang dapat memberi dampak buruk pada manusia dan lingkungan melalui pencemarannya. Tidak jarang pula teknologi membutuhkan modal besar dan cara pemakaian yang rumit sehingga tidak dapat dimanfaatkan oleh masyarakat menengah kebawah.

Padahal dengan berkembangnya zaman masyarakat dituntut untuk menguasai teknologi dan memanfaatkannya. Indonesia yang dilimpahi sumber daya alam yang beragam harus mampu diolah menjadi produk oleh masyarakat yang tentunya pasti membutuhkan teknologi.⁴ Dalam upaya pemerataan dan meningkatkan pembangunan di seluruh Indonesia, pembangunan masyarakat perlu ditingkatkan, sehingga dapat mencapai mutu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang adil dan sejahtera. Dalam rangka meningkatkan sistem usaha pembangunan masyarakat supaya lebih produktif dan efisien, diperlukan teknologi. Salah satu hal penting untuk menciptakan sistem teknologi baru dalam konteks tersebut adalah “teknologi tepat guna”.

TTG (Teknologi Tepat Guna) adalah bentuk bahasa mudah dari kata “*appropriate technology*”, yang merupakan suatu pengertian dengan makna tertentu yang pada dasarnya dilihat dari aspek teknis. TTG lebih sering ditemukan dalam bentuk teknologi tradisional yang dipergunakan oleh masyarakat dengan penghasilan rendah. Yang dimana Masyarakat tersebut sangat kecil peluang memiliki kesempatan untuk memakai teknologi maju dan efisien, yang merupakan

⁴ Nurul Izzati, Skripsi: “*Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program POSYANTEKDES (Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Desa)*”, (Riau: UIN Sultan Syarif Kasim, 2021), Hal 1.

pola teknologi dari masyarakat maju/industri. Secara pemahaman TTG diartikan sebagai penghubung antara teknologi tradisional dengan teknologi maju.⁵

Dalam membahas pendampingan teknologi tepat guna di Kota Jambi dinas yang mengurus dan bertanggung jawab dalam membina yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMPPA). Dinas Pemberdayaan masyarakat Kota ini Membina program TTG serta Posyantek yang ada di Kota Jambi.⁶ Posyantek sendiri adalah sebuah singkatan dari Pos Pelayanan Teknologi. Posyantek disini adalah sebagai suatu lembaga pelayanan TTG antar desa atau kelurahan yang berkedudukan di kecamatan yang memberikan pelayanan teknis, informasi dan orientasi berbagai jenis TTG.⁷ Pada beberapa wilayah di Indonesia, untuk memudahkan pemusatan pemanfaatan TTG, maka dibentuk POSYANTEK (Pos Pelayanan Teknologi).⁸

Kota Jambi Kegiatan atau program teknologi tepat guna ini ada di setiap Kecamatan di Kota Jambi. Walaupun program teknologi tepat guna ini sudah ada di setiap Kecamatan Kota Jambi, masih banyak Masyarakat yang belum mengerti apa itu teknologi tepat guna. Oleh karena itu Program teknologi tepat guna ini di jadikan suatu ajang pameran dan lomba untuk diperkenalkan kepada Masyarakat luas. Kegiatan Lomba teknologi tepat guna ini sendiri memiliki jenjang tingkatan

⁵ Mira Rusmalinta, Skripsi: *“Dampak Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam Pertanian Terhadap Perubahan Sosial Keagamaan Masyarakat Petani”*, (Lampung: UIN Raden Intan, 2021), Hal 15.

⁶ Wawancara dengan Bapak Alfan, Selaku STAF Teknologi Tepat Guna di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi, Pada tanggal 9 Juni 2022, Pukul 09.50 WIB

⁷ Peraturan Menteri desa, No.23 Tahun 2017 Tentang *“Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa”*

⁸ Nurul Izzati, Skripsi: *“Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program POSYANTEKDES (Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Desa)”*, (Riau: UIN Sultan Syarif Kasim, 2021), Hal 2.



mulai dari tingkat Kota Sampai Tingkat Nasional. Dan kegiatan lomba ini di adakan setiap tahun.

Penilaian alat teknologi tepat guna dilakukan dengan melihat manfaat diciptakannya suatu alat TTG Untuk tujuan membantu menyelesaikan permasalahan yang ada di suatu daerah. Kriteria penilaian yang dibutuhkan teknologi tepat guna juga dilihat dari pemanfaatan sumber daya di sekitar sehingga bisa membantu ekonomi masyarakat sekitar. Hal inilah yang menjadi dasar landasan utama teknologi tepat guna.⁹

Berikut ini adalah Tabel data alat Teknologi Tepat Guna (TTG) di setiap posyantek di Kota Jambi pada tahun 2020:

Tabel 1
Data Alat TTG Kota Jambi

No	Kabupaten/ Kota	Alat Teknologi Tepat Guna		Ket
		Nama Alat	Inovator	
1	Kota Jambi	Piring Makanan Putar	Solihin	Tingkat Kota Jambi
2	Kota Jambi	Alat Pembuat Asap Ikan Sale	Sujianto	
3	Kota Jambi	Alat Hidrofonik	Baharuddin Saleh	

⁹ Wawancara dengan Ibu Fairosz, Selaku Kasi Teknologi Tepat Guna di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi, Pada tanggal 9 Juni 2022, Pukul 10.00 WIB

4	Kota Jambi	Spinner alat Penyiram tanaman	Arief wibowo	
5	Kota Jambi	Pengaduk fermentasi pupuk cair	Tohan Ansori	

Dari tabel diatas dapat kita ketahui salah satu contoh dari Teknologi yang di buat dari TTG ini misalnya alat teknologi Lempeng (Lemari Pengereng makanan) yaitu alat teknologi yang digunakan untuk mengeringkan makanan-makanan seperti kerupuk dan yang lainnya. Dengan adanya Teknologi Tepat Guna ini masyarakat seharusnya menjadi lebih mudah dalam mengeringkan makanan yang dimana tidak harus di jemur di luar dengan memanfaatkan panas matahari. Dan juga dengan alat seperti itu masyarakat juga bisa menghemat waktu dalam melakukan pengeringan makanannya sehingga masyarakat bisa melakukan kegiatan lainnya tanpa harus terlalu fokus dalam mengeringkan makanan.

Dalam menjalankan program teknologi tepat guna ini permasalahan yang ditemukan di kota jambi yaitu mindset dari masyarakatnya dalam menciptakan alat teknologi tepat guna itu, masyarakat masih banyak yang berfikiran bahwa dalam membuat suatu alat TTG ini diperlukan dana yang besar, yang dimana seharusnya alat TTG diciptakan dengan memanfaatkan sumber daya disekitar tanpa diperlukannya dana yang besar.¹⁰

¹⁰ Wawancara dengan Ibu Fairos, Selaku Kasi Teknologi Tepat Guna di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi, Pada tanggal 9 Juni 2022, Pukul 10.20 WIB



Dalam proses pengembangan teknologi tepat guna kerap ditemukan adanya kesenjangan yang cukup besar antara pemberi teknologi dengan masyarakat sebagai penerima teknologi. Mengingat faktor-faktor tersebut dan adanya keterbatasan modal maka dalam proses alih teknologi kepada masyarakat diperlukan bantuan berbagai pihak yang berkepentingan, baik Pemerintah maupun non-Pemerintah, termasuk skema pendanaan mikro (*microfinancing*) baik dari perbankan maupun lembaga keuangan lainnya. Oleh karena itu diperlukannya pendampingan dalam pengembangan teknologi tepat guna agar masalah yang ada bisa di atasi dengan baik dan tidak merugikan pihak manapun.

Berdasarkan uraian latar belakang dari masalah di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Kebijakan Pemerintah Dalam Pendampingan Teknologi Tepat Guna di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi”**. Dengan fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui tercapainya tujuan dari pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG) yaitu untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Kota Jambi.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apa syarat dan ketentuan yang dijadikan sebagai panduan dalam pendampingan teknologi tepat guna pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi?



2. Bagaimana regulasi pendampingan teknologi tepat guna masyarakat Kota Jambi?
3. Bagaimana kebijakan pendampingan teknologi tepat guna pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi?

C. Batasan Masalah

Pembatasan masalah dilakukan untuk menghindari pelebaran pada pokok pembahasan yang lain. sehingga penulis disini akan membatasi masalah yang akan di teliti dalam penulisan nantinya.

Jadi dalam penelitian ini penulis akan membahas masalah yang berkaitan dengan program teknologi tepat guna. penulis akan membatasi masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah tentang “Kebijakan Pemerintah Dalam Pendampingan Teknologi Tepat Guna di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi”

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penulisan ini pada hakekatnya dapat memberikan informasi atau gambaran yang jelas terhadap Kebijakan dalam pendampingan teknologi tepat guna melalui analisa dan telaah data serta informasi yang diperoleh di lapangan, adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui syarat dan ketentuan yang dijadikan sebagai panduan dalam pendampingan teknologi tepat guna pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi

- b. Untuk mengetahui regulasi pendampingan teknologi tepat guna masyarakat Kota Jambi.
- c. Untuk mengetahui kebijakan pendampingan teknologi tepat guna pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara praktis maupun secara teoritis, sebagai berikut:

a. Kegunaan Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna dan dapat memberi kontribusi bagi masyarakat luas umumnya dan para wanita khususnya, serta Pemerintah dan petugas lini lapangan yang bertanggung jawab dalam program Kampung Keluarga Berencana.

b. Kegunaan Secara Praktis:

- 1) Bagi Peneliti, sebagai sarana untuk mengembangkan keilmuan dan menambah wawasan bagi penulis yang telah didapat selama dibangku perkuliahan. Juga sebagai ilmu yang dapat di implementasikan di masyarakat. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
- 2) Bagi Instansi, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan pertimbangan keputusan terkait topik penelitian penulis dan merupakan sumbangan pemikiran bagi kampus Universitas Islam Negeri Sultan Thaha

Saifuddin Jambi sebagai wujud terimakasih penulis atas ilmu yang didapat selama menempuh pendidikan sarjana.

- 3) Bagi Fakultas, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah perbendaharaan referensi kepastakaan bagi mahasiswa yang mengkaji tentang efektivitas program pemerintah Kampung Keluarga Berencana.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah metode ilmiah untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Tujuan metode ilmiah adalah agar kegiatan penelitian bergantung pada ciri-ciri ilmu, yaitu rasional, sistematis, dan empiris. maka dalam penulisan penelitian yang berjudul “Kebijakan Pemerintah Dalam Pendampingan Teknologi Tepat Guna (TTG) di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi” yaitu menggunakan metode kualitatif, dengan rancangan penelitian deskriptif kualitatif. Metode Kualitatif adalah suatu metode penelitian yang menggunakan pemahaman yang mendalam sehingga dapat menghasilkan kajian yang komprehensif.

1. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak. Waktu penelitian dilaksanakan setelah dikeluarkannya surat izin riset untuk melanjutkan proses penelitian.

Adapun objek penelitian ini ditekankan pada Pendampingan dari Teknologi Tepat Guna (TTG) yang di lakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pembedayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Jambi. Dalam hal ini

aparap pemerintah setempat ikut terlibat guna dalam mendapatkan informasi yang lebih akurat sehingga akan membantu bagi penulis dalam membuat skripsi ini.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dapat ditentukan dari bentuk penelitian yang akan dilaksanakan. Penelitian ini mengkaji Kebijakan Pemerintah Dalam Pendampingan Teknologi Tepat Guna (TTG). Sesuai dengan kasus yang akan dibahas maka penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif metode penelitian kualitatif adalah penelitian untuk mempelajari objek alam, peneliti adalah alat utama, dan teknik pengumpulan data dilakukan secara manual gabungan, analisis data adalah induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini mengkaji Kebijakan Pemerintah Dalam Pendampingan Teknologi Tepat Guna (TTG). Pendekatan penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data-data yang berupa kata-kata dan gambar yang di dasarkan oleh data dan kejadian yang nyata yang didapatkan dalam melakukan survei ataupun terjun ke lapangan dengan tujuan untuk mendapatkan data dengan keadaan yang sebenarnya.¹¹

¹¹ Lexy J. Moleong, *Metode penelitian Kualitatif Edisi Refisi*, (Bandung : PT. Rosuda Karya , 2006), hlm. 3

4. Jenis dan Sumber Data Penelitian

a) Jenis Data

jenis data yang digunakan dalam penelitian:

1) Data Primer

Data Primer atau data asli adalah data yang diperoleh dari sumber aslinya atau Sumber Pertama. yang diperoleh secara langsung dari lokasi objek penelitian. Adapun sumber data primer yang didapatkan adalah data asli yang akan di dapatkan dari wawancara seorang informan yang dimana adalah dinas pemberdayaan masyarakat dengan tujuan mendapatkan informasi tentang Kebijakan Pemerintah Dalam Pendampingan Teknologi Tepat Guna (TTG) di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung biasanya tersusun dalam bentuk dokumen. Sumber yang didapatkan dari referensi-referensi buku, internet, dan hasil penelitian lainnya.

b) Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian yaitu sebuah sumber subjek dari mana data diperoleh. Sumber data dalam penelitian kualitatif ini adalah orang atau narasumber yang diwawancarai dan bukan hanya narasumber tetapi pemilik informasi

5. Unit Analisis

Unit analisis adalah satuan yang terpenting berkaitan dengan benda, individu, atau kelompok sebagai subjek dalam penelitian. Unit analisis berguna untuk menentukan informasi atau orang yang kita wawancarai. Salah satunya yaitu dengan menggunakan non random sampling atau memperoleh data berdasarkan suatu karakteristik atau ciri-ciri untuk mendapatkan sampel relevan dalam penelitian. Peneliti yang menentukan siapa saja yang ingin diwawancarai dengan tujuan mendapatkan informasi dari permasalahan-permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Pemberi informasi merupakan kunci utama untuk memecahkan masalah. Dan untuk jumlah yang ingin diwawancarai tentunya sesuai kebutuhan dalam penelitian. Informan yang dipilih untuk penelitian ini adalah Kepala dinas DPMPPA dan kepala bidang serta kasi pengelola Teknologi Tepat Guna (TTG) dari dinas pemberdayaan masyarakat pemberdayaan perempuan dan Perlindungan anak di Kota Jambi.

6. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data adalah alat yang digunakan dalam mengumpulkan data dan fakta penelitian.¹² Instrumen penelitian merupakan langkah yang paling utama dalam melakukan penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Adapun pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

¹² Iin Tri Rahayu dan Tristiadi Ardi Ardani, *Observasi dan wawancara*, (Jawa Timur: Bayumedia Publishing, 2004) hlm 1

a) Observasi

Observasi adalah sebuah pencatatan fenomena yang dilakukan secara sistematis. Pengamatan dapat dilakukan secara terlibat (partisipatif) ataupun nonpartisipatif.¹³ Observasi juga diartikan sebagai Proses kompleks terdiri dari berbagai proses biologis dan Secara psikologis, dua proses terpenting adalah proses observasi dan proses memori. Ketika peneliti mengamati bahwa informan sedang mensosialisasikan peran teknologi tepat guna, peneliti mengamatinya.

Dalam hal ini peneliti akan melakukan observasi di dinas pemberdayaan masyarakat pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Yaitu peneliti akan mengamati bagaimana kebijakan yang dilakukan oleh dinas pemberdayaan masyarakat pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam melakukan pendampingan dari teknologi tepat guna itu.

b) Wawancara

Wawancara adalah sebuah proses tanya jawab dalam sebuah penelitian yang berlangsung secara lisan kepada pihak yang terlibat dalam penelitian, informasi yang diperoleh kemudian di dokumentasikan dalam bentuk catatan tertulis, maupun audio untuk memperkuat penilaian data yang diperoleh.¹⁴ Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data untuk mengetahui bagaimana Kebijakan Pemerintah Dalam Pendampingan Teknologi Tepat Guna (TTG) di Dinas

¹³ M. Syamsudin, *Operasional Penelitian Hukum*, (Jakarta; PT.Raja Grafindo Persada, 2007)

¹⁴ Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metodologi Penelitian*. (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2002) Hlm. 33-34

Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi.

Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini akan di arahkan kepada: Kepala dinas pemberdayaan masyarakat pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk membahas terkait kebijakan pendampingan teknologi tepat guna. Wawancara juga akan dilakukan kepada Kepala Bidang dan Kasi yang mengelola Teknologi tepat guna di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk membahas terkait teknis pendampingannya. Wawancara ini dilakukan dengan memberikan pertanyaan secara langsung untuk mendapatkan informasi secara lebih jelas.¹⁵

c) Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan peristiwa masa lalu. Dokumen dapat berupa kata-kata, gambar, atau karya peringatan seseorang. Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah tentang observasi dan wawancara yang berkaitan dengan bentuk informasi lisan dan nonverbal serta kendala yang dihadapi peneliti Data pendukung untuk hasil.

Jadi disini peneliti akan mendokumentasikan hasil atau informasi yang sudah di dapatkan dari observasi dan wawancara yang terkait kebijakan yang dilakukan dinas pemberdayaan masyarakat pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam pendampingan teknologi tepat guna di kota jambi.

¹⁵ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung : Alfabeta, 2014), hlm 54

7. Tehnik Analisis data

Dalam penelitian kualitatif terdapat Tiga tahapan dalam menganalisis datanya, yaitu:

- 1) Data *Reduction* (Reduksi Data) Reduksi data adalah suatu proses dalam menyempurnakan data, baik dilakukan dengan mengurangi data yang dianggap kurang relevan atau tidak perlu, maupun dengan menambahkan data yang dianggap masih kurang. Reduksi data adalah proses merangkum hasil penelitian dengan memilih hal yang pokok serta memfokuskan kepada hal yang penting. Dengan demikian data yang direduksi akan mempermudah peneliti, dengan memberikan gambaran yang jelas.
- 2) Data *Display* (Penyajian Data) Penyajian data adalah suatu proses yang dilakukan untuk mempermudah dalam memahami apa yang terjadi selama melaksanakan penelitian yang berlangsung. Penyajian data merupakan proses pengumpulan informasi yang disusun berdasarkan kategori atau pengelompokan-pengelompokan yang diperlukan. Menurut Miles and Huberman dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antarkategori, **flowchart** dan sejenisnya. Ia mengatakan “yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.
- 3) *Conclusion Drawing* (Penarikan Kesimpulan) Langkah terakhir dalam teknik analisis data adalah verifikasi data. Verifikasi data dilakukan apabila kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan ada perubahan-perubahan bila tidak dibarengi dengan bukti-bukti pendukung yang

kuat untuk mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Bila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung dengan bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penelitian kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel atau dapat dipercaya.¹⁶

F. Tinjauan Pustaka

Tinjauan Tinjauan pustaka adalah uraian hasil-hasil penelitian terdahulu (penelitian-penelitian lain) yang berkaitan dengan penelitian ini pada aspek fokus/tema yang diteliti. Tinjauan pustaka merupakan tempat untuk membahas semua data penelitian yang memiliki kemiripan dengan penelitian ini secara runtut. Peneliti menjabarkan dan menunjukkan dengan gamblang bahwa penelitian yang akan penulis lakukan jelas berbeda dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya. Dalam tinjauan ini penelitian terdahulu yang saya gunakan diambil dari beberapa penelitian yaitu:

Pertama, merupakan penelitian dari Gede Eka Dharma Antara, yang Berjudul “Peningkatan Inovasi Teknologi Tepat Guna dan Program Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Untuk Memajukan Industri Kreatif di Bali”. Penelitian ini mengkaji tentang memajukan industri kreatif di Bali yaitu dengan memaksimalkan pemakaian teknologi informasi sebagai fasilitator dan mediator dalam mempermudah serta menjembatani antara produsen, pelaku usaha dan konsumen. Dan juga peningkatan inovasi teknologi tepat guna melalui program pemerintah

¹⁶ Sugiyono, “Metode Penelitian Kuantitati, Kualitatif dan R&D”,(Bandung: Alfabeta, 2015), Hal 247-253

dengan berbasis pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Kualitatif yakni dengan menggunakan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi yang didapatkan dari narasumber yang tepat dan paham bagaimana perkembangan sektor industri kreatif di Bali untuk dimintai data terkait penelitian. kendala dan masalah yang dihadapi adalah masih kurangnya Penyediaan fasilitas teknologi informasi untuk memudahkan pencarian dan pemilihan. Dan juga penggunaan teknologi informasi dan inovasi dalam pemanfaatan teknologi tepat guna (TTG) untuk Masyarakat masih kurang. lalu upaya yang di lakukan adalah dengan memperbanyak dan memperbaiki fasilitaas teknologi inforamasi di bali, semua itu tidak lain dilakukan demi tercapainya Tujuan untuk memajukan industri kreatif di Bali.¹⁷

Kedua, merupakan penelitian dari Mira Rusmalinta, yang Berjudul “Dampak penerapan Teknologi Tepat Guna dalam Pertanian terhadap perubahan Sosial Keagamaan Masyarakat Petani di Desa Margo Mulyo Kecamatan Jati Agung Lampung Selatan” Penelitian ini Mengkaji Tentang Kehidupan sosial dan Keagamaan Masyarakat Petani di Desa Margo Mulyo yang masih sangat kurang hal ini dikarenakan waktu para petani itu sudah dihabiskan dari pagi hingga sore di ladang. Oleh karena itu TTG di perlukan untuk membantu para petani itu. dengan adanya mesin Teknologi Tepat Guna ini para petani bisa menjalankan kegiatan-kegiatan lain seperti kegiatan sosial seperti bergotong royong dan kegiatan keagamaan seperti shalat berjamaah. Penelitian ini menggunakan metode

¹⁷ Gede Eka Dharma Antara, “Peningkatan Inovasi Teknologi Tepat Guna dan Program BerbasisPemberdayaan Masyarakat untuk Memajukan Industri Kreatif di Bali”, Jurnal Pasti,Vol.9 No.3, Hal 257-268.

pendekatan pendekatan Kualitatif yakni dengan menggunakan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi yang didapatkan dari narasumber yakni aparat desa, Tokoh agama dan Masyarakat Petani. Kendala dan Masalah dalam Penelitian ini yaitu bahwa Penerapan Teknologi tepat Guna pada masyarakat Petani di Desa Margo Mulyo ini perlu diterapkan dengan mempertimbangkan keadaan alam di sekitar. Hal ini diartikan bahwa dalam penerapan Teknologi Tepat Guna harus lebih besar dibandingkan dengan pemakaian teknologi tradisional maupun teknologi yang lebih maju. Dengan demikian manfaat dari penerapan Teknologi Tepat Guna tersebut dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. Upaya yang dilakukan yakni dengan menciptakan teknologi tepat guna yang bisa berdampak baik bagi alam sekitar dan juga bermanfaat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemecahan masalah, pemenuhan kebutuhannya, dan peningkatan hasil produksi yang lebih dari biasanya.¹⁸

Ketiga, merupakan penelitian dari Riza Fauziyah, yang Berjudul “Partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat melalui program pos pelayanan Teknologi Tepat Guna (TTG) di Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat” pada penelitian ini mengkaji tentang Partisipasi masyarakat Kecamatan Grogol Petamburan dalam program pemerintah yaitu pos pelayanan Teknologi Tepat Guna (Posyantek), yang dimana hal ini dilakukan agar masyarakat mendapatkan pengetahuan tentang teknologi tepat guna, sehingga dapat bermanfaat untuk

¹⁸ Mira Rusmalinta, Skripsi: “*Dampak Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam Pertanian Terhadap Perubahan Sosial Keagamaan Masyarakat Petani*”, (Lampung: UIN Raden Intan, 2021), Hal 2-35



kegiatan produktif dan perubahan ekonomi. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. yakni dengan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta data yang diperoleh dari catat-catatan, buku-bukuan, dan dokumen-dokumen. Kendala dan masalah dalam penelitian ini yaitu kurangnya partisipasi serta pengetahuan masyarakat tentang program Posyantek ini. Upaya yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan cara masyarakat dapat merasakan suatu proses pencapaian dari program yang mana melibatkan masyarakat itu sendiri.¹⁹

Dari beberapa penelitian terdahulu diatas yang sudah di jelaskan terdapat beberapa perbedaan dan kesamaan secara akademis dengan penelitian ini, perbedaannya yaitu penulis dalam penelitian ini lebih memfokuskan kearah bagaimana Kebijakan pemerintah dalam Pendampingan teknologi tepat guna itu, sedangkan dari ketiga penelitian terdahulu diatas lebih menjelaskan bagaimana peranan program teknologi tepat guna itu dapat di manfaatkan untuk masyarakat. Persamaannya yaitu penelitian ini dan dengan ketiga penelitian terdahulu diatas sama-sama membahas tentang keterkaitan pemerintah dalam Kegunaan teknologi tepat guna

¹⁹ Riza Fauziyah, Skripsi: *“Partisipasi Masyarakat dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna (POSYANTEK) di Kecamatan Grogol Pelambunan Jakarta Barat”*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2020), hal 1-130



G. Jadwal Penelitian

Untuk memudahkan penelitian maka penulis membuat jadwal penelitian sebagai berikut:

Tabel 2
Jadwal Penelitian

Kegiatan	Tahun 2021 – 2022											
	Oktober	November	Desember	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September
Pengajuan Judul	X											
Pembuatan Proposal		X		X								
Penunjukan Dosen Pembimbing			X									
Keluar Jadwal Seminar					X							
Ujian Seminar Proposal					X							
Pengesahan Judul										X		
Surat Izin Riset										X		
Pengumpulan Data											X	
Pengelolaan dan Analisis Data											X	
Bimbingan dan Perbaikan Skripsi												X



BAB II KERANGKA TEORI

A. Kerangka Teoritis dan Konseptual

Teori merupakan alur logika atau penalaran yang berupa seperangkat konsep, definisi, dan proporsi yang disusun secara sistematis. Teori berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan, dan pengendalian terhadap sesuatu gejala. Deskripsi teori berisi mengenai uraian yang terstruktur tentang teori dan hasil-hasil penelitian yang relevan dengan masalah yang diteliti. Setiap penelitian diperlukan adanya suatu teori untuk dijadikan sebagai dasar dalam melakukan penelitian. Dasar atau landasan teoritis dalam penelitian ini secara rinci akan dipaparkan sebagai berikut:

Terkait dengan kajian mengenai kebijakan pemerintah dalam melakukan pendampingan teknologi tepat guna di dinas pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kota jambi merupakan suatu masalah yang akan dikaji. Oleh karena itu dibutuhkan penelaahan yang cukup mendalam dan terfokus sebagai acuan teoritis dalam penelitian ini. Maka berikut dikemukakan mengenai teori yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah dalam melakukan pendampingan teknologi tepat guna di dinas pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kota jambi dapat dipaparkan dalam kajian teoritis sebagai berikut:

1. Kerangka Teoritis

Berdasarkan pada judul yang diangkat, agar tidak terjadi penafsiran yang berlainan maka perlu dijelaskan beberapa istilah yang terdapat di dalamnya sebagai berikut

a) Teori Pemberdayaan Masyarakat

Secara konseptual, pemberdayaan atau pemberkuasaan (empowerment) , berasal dari kata power (kekuasaan atau keberdayaan). Karenanya, ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan. Kekuasaan sering kali dikaitkan dengan kemampuan kita membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka. Ilmu sosial tradisional menekankan bahwa kekuasaan sebagai sesuatu yang tidak berubah atau tidak dapat diubah. Kekuasaan sesungguhnya tidak terbatas pada pengertian di atas. Kekuasaan tidak tervakum dan terisolasi. Menurut Isbandi Rukminto Adi, pemberdayaan masyarakat memiliki 7 (tujuh) tahapan, yaitu sebagai berikut:²⁰

1) Tahap Persiapan

Pada tahapan ini ada dua tahapan yang harus dikerjakan, yaitu: pertama, penyimpanan petugas, yaitu tenaga pemberdayaan masyarakat yang bisa dilakukan oleh komunitas, dan kedua penyiapan lapangan yang pada dasarnya diusahakan dilakukan secara non-direktif.

2) Tahapan Pengkajian

Pada tahapan ini yaitu proses pengkajian dapat dilakukan secara individual melalui kelompok kelompok dalam masyarakat. Dalam hal ini petugas harus berusaha mengidentifikasi masalah kebutuhan yang dirasakan (feel needs) dan juga sumber daya yang dimiliki klien.

²⁰ Isbandi Rukminto Adi, *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2008), hlm 35-47.

3) Tahap Perencanaan Alternatif Program atau Kegiatan

Pada tahapan ini petugas sebagai agen perubahan secara partisipatif mencoba melibatkan warga untuk berfikir tentang masalah yang mereka hadapi dan bagaimana cara mengatasinya. Dalam konteks ini masyarakat diharapkan dapat memikirkan beberapa alternatif program dan kegiatan yang dapat dilakukan.

4) Tahap Formulasi Rencana Aksi

Pada tahapan ini agen perubahan membantu masing-masing kelompok untuk merumuskan dan menentukan program dan kegiatan apa yang mereka akan lakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada. Disamping itu juga petugas membantu untuk memformulasikan gagasan mereka ke dalam bentuk tertulis, terutama bila ada kaitannya dengan pembuatan proposal kepada penyandang dana.

5) Tahap Pelaksanaan Program atau Kegiatan

Dalam upaya pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat peran masyarakat sebagai kader diharapkan dapat menjaga keberlangsungan program yang telah dikembangkan. Kerja sama antar petugas dan masyarakat merupakan hal penting dalam tahapan ini karena terkadang sesuatu yang sudah direncanakan dengan baik melenceng saat dilapangan.

6) Tahap Evaluasi

Evaluasi sebagai proses pengawasan dari warga dan petugas program pemberdayaan masyarakat yang sedang berjalan sebaiknya dilakukan dengan melibatkan warga. Dengan keterlibatan warga tersebut diharapkan dalam jangka

waktu pendek biasanya membentuk suatu sistem komunitas untuk pengawasan secara internal dan untuk jangka panjang dapat membangun komunikasi masyarakat yang lebih mandiri dengan memanfaatkan sumber daya yang ada

7) Tahap Terminasi

Tahap terminasi merupakan tahapan pemutusan hubungan secara formal dengan komunitas sasaran. Dalam tahap ini masyarakat sudah bisa mandiri, bahkan dilakukan karena penyandang dana telah menghentikan bantuannya.

Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (freedom), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan, menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan; dan berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.

Dalam melaksanakan pemberdayaan perlu dilakukan melalui berbagai pendekatan. Menurut Suharto, penerapan pendekatan pemberdayaan dapat dilakukan melalui 5P yaitu: pemungkinan, penguatan, perlindungan, penyokongan, dan pemeliharaan, dengan penjelasan sebagai berikut:²¹

²¹ Edi Suharto, *Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 67



- 1) Pemungkinan, menciptakan suasana atau iklan yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekerat-sekerat kultural dan struktur yang menghambat.
- 2) Penguatan, memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuh-kembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri agar dapat menunjang menunjang kemandirian masyarakat tersebut.
- 3) Perlindungan, melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidakimbang atau tidak sehat antara yang kuat dan lemah, dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok-kelompok kuat terhadap kelompok lemah. Pemberdayaan harus diarahkan kepada penghapusan segala jenis diskriminasi dan mendominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil.
- 4) Penyokong, memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan perannya dan tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh dalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan.
- 5) Pemeliharaan, memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan



keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha.

2. Kerangka Konseptual

Terkait dengan kajian mengenai Kebijakan Pemerintah Dalam Pendampingan Teknologi Tepat Guna (TTG) Dikota Jambi merupakan suatu masalah yang akan dikaji. Oleh karena itu dibutuhkan penelaahan yang cukup mendalam dan terfokus sebagai acuan teoritis dalam penelitian ini. Maka berikut dikemukakan mengenai teori yang berkaitan dengan Kebijakan Pemerintah Dalam Pendampingan Teknologi Tepat Guna (TTG) Dikota Jambi dapat dipaparkan dalam kajian teoritis sebagai berikut:

a. Pendampingan

Pendampingan adalah pekerjaan yang dilakukan oleh fasilitator atau pendamping masyarakat dalam berbagai kegiatan program. Fasilitator juga seringkali disebut fasilitator masyarakat (*community facilitator/CF*) karena tugasnya lebih sebagai pendorong, penggerak, katalisator, motivator masyarakat, sementara pelaku dan pengelola kegiatan adalah masyarakat sendiri.²²

Pendampingan sebagai suatu strategi yang umum digunakan oleh pemerintah dan lembaga non profit dalam upaya meningkatkan mutu dan kualitas dari sumber daya manusia, sehingga mampu mengidentifikasi dirinya sebagai bagian dari permasalahan yang dialami dan berupaya untuk mencari alternative pemecahan

²² Lihat tulisan yang berjudul “*Kerangka Kerja Pengembangan Masyarakat*”, “*Pelaku dan Praktek Pengembangan Masyarakat*”, dan “*Paradigma dan Ideologi LSM di Indonesia*”.

masalah yang dihadapi. Kemampuan sumber daya manusia sangat dipengaruhi oleh keberdayaan dirinya sendiri.

Menurut *Suharto*, menguraikan bahwa pendampingan merupakan satu strategi yang sangat menentukan keberhasilan program pemberdayaan masyarakat.

Menurut *Wiryasaputra*, pendampingan adalah proses perjumpaan pertolongan antara pendamping dan orang yang didampingi. Perjumpaan itu bertujuan untuk menolong orang yang didampingi agar dapat menghayati keberadaannya dan mengalami pengalamannya secara penuh dan utuh, sehingga dapat menggunakan sumber-sumber yang tersedia untuk berubah, bertumbuh, dan berfungsi penuh secara fisik, mental, spiritual, dan sosial. Karena pendampingan merupakan perjumpaan, maka ada dinamika yang terus berkembang. Dinamika itu berubah dari waktu ke waktu. Ada banyak irama dan warna. Pendampingan merupakan proses perjumpaan yang dinamis

Purwadarminta menyatakan, pendampingan adalah suatu proses dalam menyertai dan menemani secara dekat, bersahabat dan bersaudara, serta hidup bersama-sama dalam suka dan duka, bahu-membahu dalam menghadapi kehidupan dalam mencapai tujuan bersama yang diinginkan.

Menurut *Deptan*, pendampingan adalah pemberdayaan masyarakat dengan menempatkan tenaga pendamping yang berperan sebagai fasilitator, komunikator dan dinamisator.

Payne bahwa pendampingan merupakan strategi yang lebih mengutamakan “*making the best of the client's resources*”. Dari penjelasan di atas memperlihatkan

bahwa pendampingan bukan saja dilakukan oleh tenaga pendamping atau petugas lapangan kepada masyarakat tetapi juga dibutuhkan keterlibatan masyarakat sebagai potensi utama untuk dikembangkan dan mengembangkan diri. Karena masyarakat lebih mengetahui apa yang dimiliki dan apa yang menjadi permasalahannya.

b. Teknologi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata teknologi mengandung arti sebagai keseluruhan sarana dalam menyediakan barang yang diperlukan bagi keberlangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Penggunaan teknologi diawali dengan perubahan sumber daya alam menjadi alat-alat sederhana. Pemanfaatan teknologi sangat penting dalam memudahkan pekerjaan, meningkatkan efisiensi dan memberi nilai tambah pada produk yang dihasilkan.²³

Definisi teknologi menurut William dan Sawyar lebih *komprehensif* yaitu adalah peristilahan umum yang menggambarkan berbagai macam teknologi yang membantu produksi, manipulasi proses, penyimpanan, komunikasi, dan atau diseminasi informasi.

²³ Ari Welianto, Pengertian dan Perkembangan Teknologi: pengertian dan perkembangan teknologi. Diakses pada tanggal 03 November 2021 Pukul 21.11.

Menurut Shelly memperluas definisi teknologi tadi dengan menambahkan alat-alat seperti perangkat keras, perangkat lunak, basis data, jaringan, dan komponen lain yang terkait yang digunakan untuk membangun sebuah sistem informasi.²⁴

Menurut Gary J. Anglin, Pengertian teknologi ialah penerapan ilmu-ilmu perilaku serta alam dan juga pengetahuan lain dengan secara bersistem serta mensistem untuk memecahkan masalah manusia.

Menurut Miarso, Pengertian teknologi ialah suatu bentuk proses yang meningkatkan nilai tambah. Proses yang berjalan dapat menggunakan atau menghasilkan produk tertentu, di mana produk yang tidak terpisah dari produk lain yang sudah ada. Hal itu juga menyatakan bahwa teknologi merupakan bagian integral dari yang terkandung dalam sistem tertentu.

Toynbee, mengatakan bahwa teknologi merupakan ciri dari adanya sebuah kemuliaan manusia, dimana hal ini membuktikan bahwa manusia tidak bisa hidup hanya untuk makan semata, namun membutuhkan lebih dari itu. Lebih lanjut dikemukakan oleh Toynbee, bahwa teknologi dapat memungkinkan konstituen non material dari sebuah kehidupan yang dimiliki manusia yaitu perasaan, ide, pemikiran, intuisi, dan juga ideal. Dan teknologi juga membuktikan sebuah manifestasi dari kecerdasan pikiran seorang manusia.

²⁴ Gede Eka Dharma Antara, “Peningkatan Inovasi Teknologi Tepat Guna dan Program BerbasisPemberdayaan Masyarakat untuk Memajukan Industri Kreatif di Bali”, Jurnal Pasti,Vol.9 No.3, Hal 261.

Manuel Castells, menyebutkan bahwa teknologi merupakan suatu kumpulan alat, aturan dan juga prosedur yang merupakan penerapan dari sebuah pengetahuan ilmiah terhadap sebuah pekerjaan tertentu dalam suatu kondisi yang dapat memungkinkan terjadinya pengulangan.

Capra, mengatakan bahwa teknologi merupakan salah satu pembahasan sistematis atas seni terapan atau pertukangan. Hal ini mengacu pada literature dari Yunani yang menyinggung mengenai Technologia yang berasal dari kata techne yang berarti wacana seni.

Read Bain, mengatakan bahwa teknologi pada dasarnya meliputi semua alat, mesin, perkakas, aparat, senjata, perumahan, pakaian, peranti pengangkut dan komunikasi, dan juga keterampilan, dimana hal ini memungkinkan kita sebagai seorang manusia dapat menghasilkan semua itu. Berdasarkan pendapat Bain tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa teknologi merupakan segala sesuatunya yang bisa diciptakan dan juga dibuat oleh seorang atau sekelompok manusia yang kemudian bisa memberikan nilai dan manfaat bagi sesama.



Berdasarkan Pengertian-Pengertian diatas maka dapat di simpulkan bahwa Kata Teknologi itu dapat di artikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang keterampilan dalam menciptakan alat hingga metode pengolahan guna membantu menyelesaikan berbagai pekerjaan manusia. teknologi informasi berperan mendukung segala kegiatan di organisasi agar dapat berjalan dengan mudah, cepat, dan akurat. teknologi informasi mjuga emberikan solusi-solusi baru dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh organisasi. Sedangkan sebagai *business drivers*, teknologi informasi menjadi *main/ core business* dalam aktifitas organisasi dalam arti memberikan arah baru dalam bisnis organisasi/ perusahaan.²⁵



²⁵ Gede Eka Dharma Antara, “Peningkatan Inovasi Teknologi Tepat Guna dan Program Berbasis Pemberdayaan Masyarakat untuk Memajukan Industri Kreatif di Bali”, Jurnal Pasti, Vol.9 No.3, Hal 261.

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Historis dan Geografis

1. Historis

Pada awalnya organisasi perangkat daerah jambi terbentuk dengan nama Badan pemberdayaan masyarakat Kota Jambi hal ini diatur dalam undang-undang No.11 Tahun 2008 tentang pembentukan Organisasi lembaga teknis Daerah Kota Jambi, Serta diatur juga dengan Peraturan Kota Jambi Nomor 23 tahun 2009 Tentang Fungsi Badan, Sekretariat, Bidang dan Rincian Tugas Subbagian Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Jambi.

dijelaskan bahwa Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Jambi adalah badan penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pemberdayaan masyarakat, Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Jambi mempunyai fungsi pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pemberdayaan masyarakat. Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Jambi mempunyai fungsi pengkoordinasian hubungan kerjasama dengan instansi pemerintah maupun swasta untuk kepentingan pelaksanaan tugas.

Susunan Organisasi dan pemberdayaan masyarakat kota jambi terdiri dari:

- a. Kepala Badan.
- b. Sekretaris. Terbagi menjadi:
 1. Subbag Umum.
 2. Subbag Keuangan.
 3. Subbag Kepegawai

- c. Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat.
 - 1. Subbidang Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro, Kelompok Usaha Ekonomi Keluarga dan Kelompok Masyarakat.
 - 2. Subbidang Pemberdayaan Ekonomi Penduduk Miskin.
- d. Bidang Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat.
 - 1. Subbidang Penguatan Kelembagaan Masyarakat dan Pemanfaatan Data Propil.
 - 2. Subbidang Pengembangan Manajemen Pembangunan Partisipatif.
- e. Bidang Pemberdayaan Adat dan Pengembangan Kehidupan Sosial Masyarakat.
 - 1. Subbidang Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga.
 - 2. Subbidang Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial dan Adat.
- f. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan SDA dan TTG.
 - 1. Subbidang Pemetaan, Pengkajian Pemesyarakatan dan Kerjasama TTG.
 - 2. Subbidang Fasilitas dan Koordinasi Sarana dan Prasarana Kelurahan.

Pada Tahun 2016 badan pemberdayaan masyarakat kota jambi ini berubah menjadi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kota Jambi hal ini di dasari dari Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah diturunkan menjadi Peraturan Walikota Jambi Nomor 43 Tahun 2016 tentang Tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMPPA) Kota jambi.

Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Perlindungan Anak Kota Jambi, mempunyai Susunan organisasi yang terdiri dari :



- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) terdiri dari :
 - 1) Sub Bagaian Perencanaan dan Evaluasi;
 - 2) Sub Bagian Keuangan dan Aset;
 - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Bidang Pemberdayaan Perempuan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender
 - 2) Seksi Pemberdayaan Kesejahteraan keluarga dan peningkatan kualitas Keluarga
 - 3) Seksi Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, ekonomi, dan sosial.
- d. Bidang pengelolaan sistem data gender dan anak terdiri dari :
 - 1) Seksi data dan informasi gender;
 - 2) Seksi data dan informasi anak;
 - 3) Seksi penyediaan layanan anak;
- e. Bidang Perlindungan anak terdiri dari:
 - 1) Seksi pemenuhan hak anak ;
 - 2) Seksi Perlindungan khusus anak;
 - 3) Seksi Pengembangan organisasi anak;



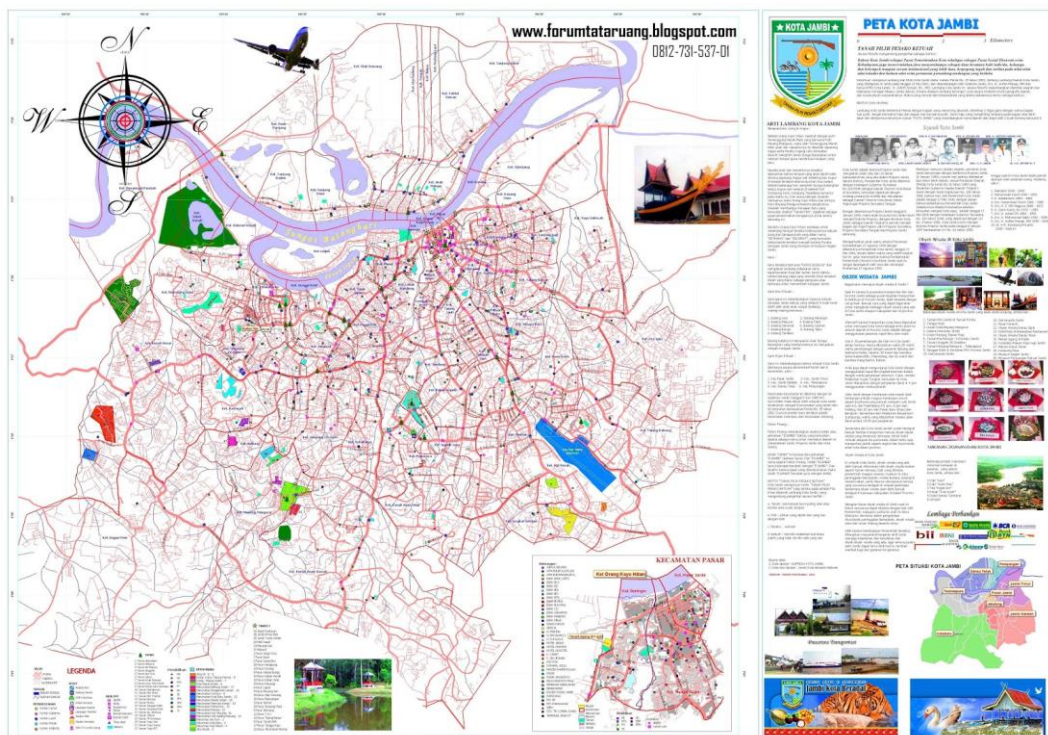
- f. Bidang Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat, terdiri dari:
- 1) Seksi sarana dan prasarana kelembagaan;
 - 2) Seksi kelembagaan pemberdayaan masyarakat dan fasilitas tim Pergerakan PKK;
 - 3) Seksi Pengembangan usaha Ekonomi Masyarakat, dan pemanfaatan SDA dan teknologi tepat guna.

Sebelum keluarnya Perda Kota Jambi Pada Tahun 2016 tentang perlindungan anak masih satu sub bagian dengan pemberdayaan perempuan di badan pemberdayaan di masyarakat Kota Jambi, namun setelah keluarnya peraturan Wali kota Nomor 43 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja pada di DPMPPA Kota Jambi, Perlindungan anak terpisah dengan pemberdayaan perempuan dimana sekarang perlindungan anak merupakan sub bagian tersendiri yang bernama bidang pemenuhan hak dan perlindungan anak DPMPPA Kota Jambi.



2. Geografis

Dalam melaksanakan Tugas dan Fungsinya untuk memberikan pelayanan kepada korban pelecehan seksual terhadap anak yang terjadi di Kota Jambi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Perlindungan Anak di Kota Jambi yang beralamat di jl. Jend. Basuki Rahmat No. 14 di Kota Baru Provinsi Jambi.



Gambar. 01. Letak Geografi

B. Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Jambi

Visi : MENJADIKAN KOTA JAMBI SEBAGAI PUSAT PERDAGANGAN DAN JASA BERBASIS MASYARAKAT BERAKHLAK DAN BERBUDAYA DENGAN MENGEDEPANKAN PELAYANAN PRIMA

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kota Jambi menentukan tujuan yaitu “Mewujudkan Peningkatan Kinerja aparatur dan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat menuju kesejahteraan keluarga dengan terlindunginya perempuan dan anak serta berkeadilan gender disemua aspek pembangunan.”

Misi : MENINGKATKAN KUALITAS MASYARAKAT PERKOTAAN.

Misi yang di jalankan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi berada pada misi ke-5 Walikota Jambi tahun 2018-2023.

C. Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi

Dinas pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMPPA) Kota Jambi mempunyai Tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak. Dalam menjalankan tugas sebagaimana yang dimaksud, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak kota jambi memiliki Fungsi yaitu sebagai berikut:

- 1) Perumusan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan masyarakat dan perlindungan perempuan dan anak
- 2) Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang pemberdayaan masyarakat dan perlindungan perempuan dan anak
- 3) Pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemberdayaan masyarakat, perempuan dan perlindungan anak
- 4) Pelaksanaan Pemetaan pemberdayaan masyarakat, perempuan dan perlindungan anak
- 5) Pelaksanaan advokasi, komunikasi , informasi dan edukasi lembaga dan pengembangan pattisipasi masyarakat, perempuan dan anak
- 6) Penyediaan data profil kelurahan, gender dan anak
- 7) Pelaksanaan pendayagunaan tenaga unit pelaksana teknis UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak
- 8) Pelaksanaan Pengembangan pos pelayanan teknologi tepat guna (Posyantek)
- 9) Pelaksanaan Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak
- 10)Fasilitasi Pelayanan Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga), Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA) dan Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA)
- 11)Pelaksanaan Pemberdayaan dan Peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dan pemberdayaan kesejahteraan keluarga serta organisasi perempuan dan anak
- 12)Penyelenggaraan urusan kesekretariatan
- 13)Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional

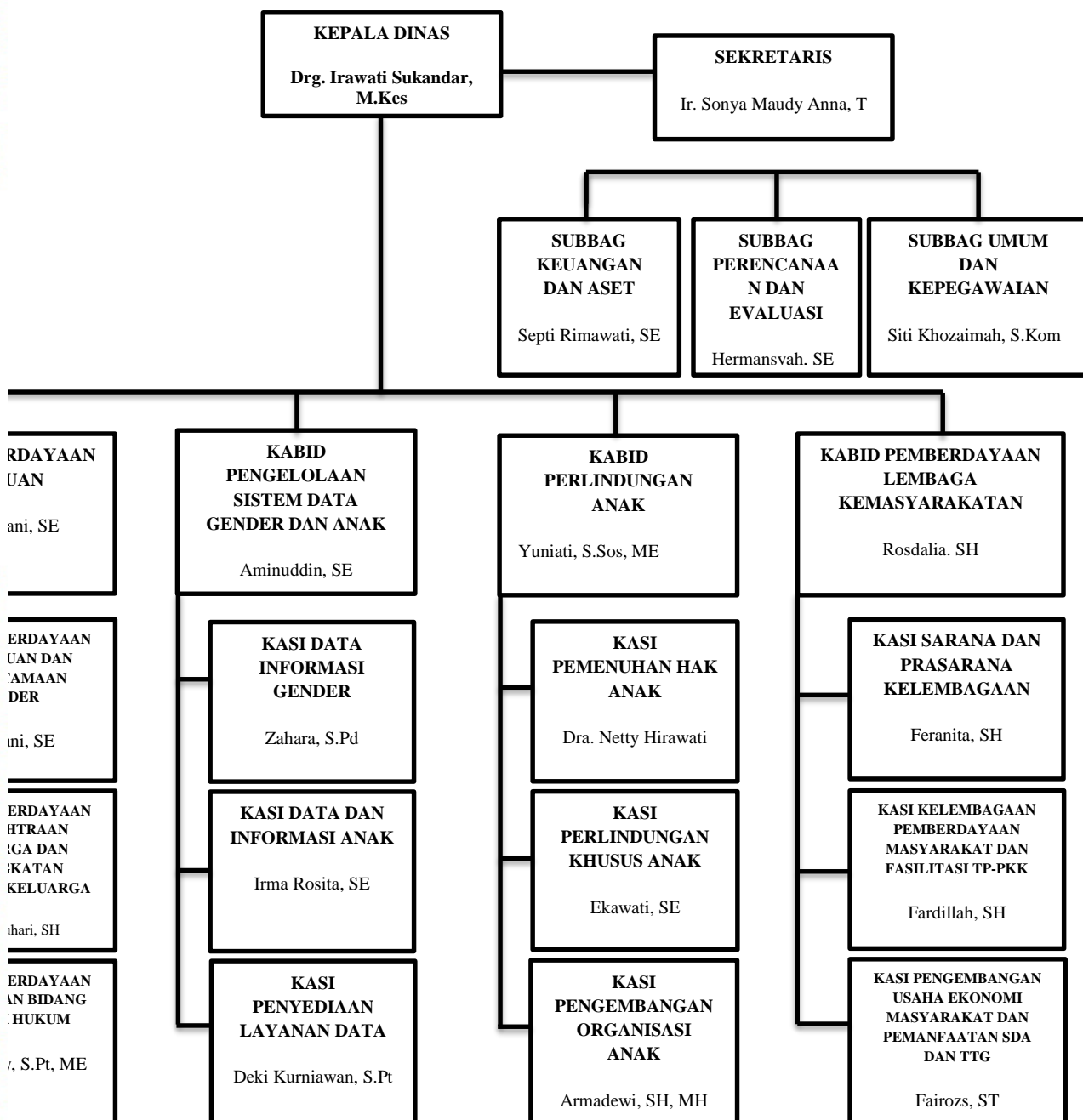
@ Hak cipta milik UIN Surtha Jambi

State Islamic University of Suthnan Thaha Saifuddin Jambi

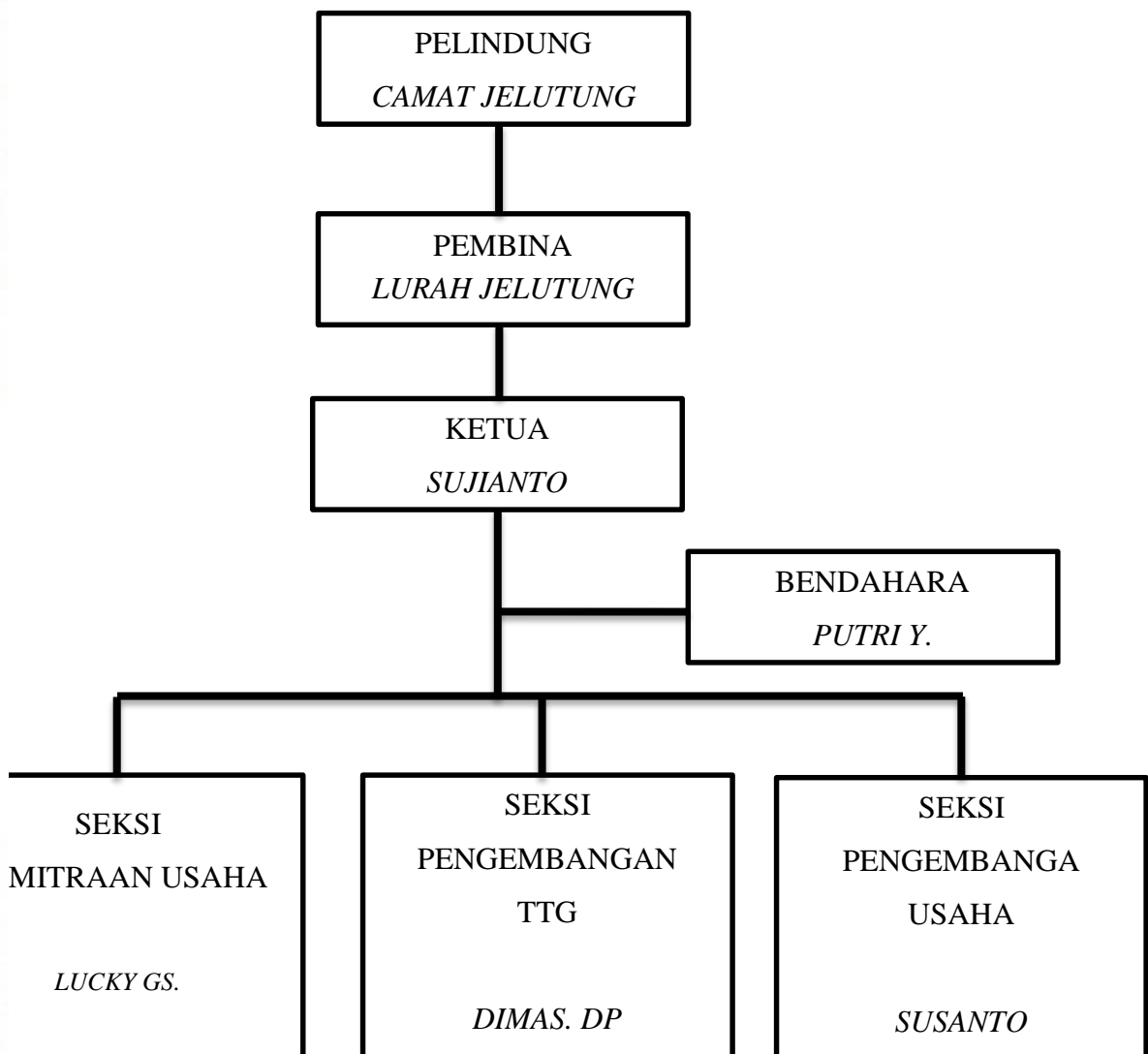


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
 1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

D. Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak kota Jambi dan Posyantek Ojo Lali Jelutung



Gambar. 2. Struktur Organisasi DPMPPA



Gambar 3. Struktur Organisasi Posyantek Ojo Lali

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Syarat dan Ketentuan Dalam Pendampingan Teknologi Tepat Guna pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi

Teknologi Tepat Guna adalah Teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dapat menjawab permasalahan masyarakat, tidak merusak lingkungan, dapat dimanfaatkan dan dipelihara oleh masyarakat secara mudah, serta menghasilkan nilai tambah dari aspek ekonomi dan aspek lingkungan. Teknologi Tepat Guna hadir sebagai jembatan antara teknologi tradisional dan teknologi modern. Pemberdayaan masyarakat melalui teknologi merupakan salah satu pilihan yang tepat agar masyarakat mampu berdaya dengan dukungan faktor teknologi.²⁶

Perkembangan teknologi saat ini cukup pesat sehingga penting untuk dikaji agar kita dapat lebih mengetahui besarnya dampak dari teknologi terhadap perubahan sosial. Penulis ingin mengetahui lebih dalam terkait bagaimana dampak penerapan dari teknologi tepat guna Terhadap perubahan sosial masyarakat di Kota Jambi. Dimana seperti yang di jelaskan diatas adalah bahwa masyarakat di tuntut agar bisa menerapkan teknologi tepat guna dalam Kehidupan sehari-hari, sehingga dalam perubahan sosial di masyarakat bisa menjadi dampak positif dan mengurangi dampak negatif dari penerapan teknologi dalam kehidupan Mereka.²⁷

²⁶ Nurul Izzati, Skripsi: “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program POSYANTEKDES (Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Desa)”, (Riau: UIN Sultan Syarif Kasim, 2021), Hal 1.

²⁷ Mira Rusmalinta, Skripsi: “Dampak Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam Pertanian Terhadap Perubahan Sosial Keagamaan Masyarakat Petani”, (Lampung: UIN Raden Intan, 2021), Hal 17.

Tujuan utama dalam Teknologi Tepat Guna yakni Pemberdayaan Masyarakat. Apa yang dimaksud dari Pemberdayaan Masyarakat adalah. Suatu upaya Pengembangan Masyarakat melalui Penciptaan Kondisi yang Memungkinkan Masyarakat Mampu Membangun diri dari Lingkungannya secara Mandiri melalui Pemberian Sumberdaya, Kesempatan dalam Pengambilan Keputusan, serta Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan.

Dalam proses pengembangan teknologi tepat guna kerap ditemukan adanya kesenjangan yang cukup besar antara pemberi teknologi dengan masyarakat sebagai penerima teknologi. Mengingat faktor-faktor tersebut dan adanya keterbatasan modal maka dalam proses alih teknologi kepada masyarakat diperlukan bantuan berbagai pihak yang berkepentingan, baik Pemerintah maupun non-Pemerintah, termasuk skema pendanaan mikro (*microfinancing*) baik dari perbankan maupun lembaga keuangan lainnya. Oleh karena itu diperlukannya pendampingan dalam pengembangan teknologi tepat guna agar masalah yang ada bisa di atasi dengan baik dan tidak merugikan pihak manapun.

Dalam melakukan pendampingan Teknologi Tepat Guna, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi memiliki syarat dan ketentuan yang dijadikan sebagai panduan dalam Pendampingan TTG. Pendampingan dilakukan dengan bertujuan Meningkatkan Kualitas Masyarakat Sehingga dalam Pembuatan Teknologi Tepat Guna ini di butuhkan alat-alat yang berprinsip sebagai peningkat ekonomi masyarakat dan pengembangan kewirausahaan. Sesuai dengan Instruksi Presiden No.3 Tahun 2001



tentang Penerapan dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna, Pemerintah melalui Dinas terkait wajib melakukan pendampingan kepada masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan program penerapan dan pengembangan teknologi tepat guna;
2. Memfasilitas penguatan kelembagaan pelayanan teknologi dalam penerapan dan pengembangan teknologi tepat guna
3. Kerjasama dengan lembaga lain dalam penerapan dan pengembangan teknologi tepat guna;
4. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program penerapan dan pengembangan teknologi tepat guna.²⁸

Rencana Strategis (Renstra) DPMPPPA Kota Jambi merupakan dokumen perencanaan yang memuat program-program pembangunan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera bersifat indikatif yang akan dilaksanakan selama lima tahun 2017-2022 Rencana Strategis (Renstra) menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi. Untuk mencapai, konsistensi yang harus dilakukan dari Implementasi target Rencana Startegis DPMPPPA Kota Jambi dalam kurun waktu tahun 2017-2022 yang termasuk dalam pemberdayaan masyarakat melalui teknologi tepat guna adalah:

²⁸ Instruksi Presiden No.3 Tahun 2001, Penerapan dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna

1. Tujuan
 - a. Meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan keluarga dalam rangka mewujudkan masyarakat yang mandiri.
2. Sasaran dan Indikator Keberhasilan
 - a. Meningkatnya kuantitas dan kualitas pengelolaan Teknologi Tepat Guna, meliputi:
 - 1) Jenis Teknologi Tepat Guna (TTG) yang akan dikembangkan dan dimasyarakatkan; dan
 - 2) Presentase masyarakat pengguna Teknologi Tepat Guna (TTG) yang mandiri.
 - b. Meningkatnya peran serta masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan setelah mendapatkan pelatihan
 - 1) Persentase pemanfaat Bina Sosial PPMK yang berusaha atau bekerja setelah mendapatkan pelatihan;
 - 2) Cakupan anggota lembaga musyawarah kelurahan yang aktif dalam penggerakan kegiatan gotong royong; dan Jumlah sarana yang dibangun atau direhab melalui fisik dana Bina Fisik Lingkungan, dan jenis Teknologi Tepat Guna (TTG) yang akan dikembangkan dan dimasyarakatkan; dan
 - 3) Persentase masyarakat pengguna Teknologi Tepat Guna (TTG) yang mandiri.



- c. Meningkatnya peran serta masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan setelah mendapatkan pelatihan.
- 1) Presentase pemanfaat Bina Sosial PPMK yang berusaha atau bekerja setelah mendapatkan pelatihan;
 - 2) Cakupan anggota lembaga musyawarah kelurahan yang aktif dalam penggerakan kegiatan gotong royong; dan
 - 3) Jumlah sarana yang dibangun atau direhab melalui fisik dana Bina Fisik Lingkungan PPMK.

Untuk mencapai hasil maksimal dalam pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) diperlukan suatu indikator kinerja, sehingga dalam pelaksanaannya sesuai dengan sasaran dan tujuan yang diinginkan. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan suatu organisasi. Penyusunan dan penetapan indikator kinerja DPMPPPA Kota Jambi dilakukan dengan mengacu pada indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang ditetapkan Pemerintah Daerah Kota Jambi dan Kementerian atau Lembaga terkait, yaitu:

1. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;



3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 Tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor 55/HK-B5/2010 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten atau Kota;
5. Peraturan Menteri Negeri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 79-II-Tahun 2010 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010-2014;
7. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor 133/PER/B1/2011 Tentang Rencana Strategis Badan, Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Tahun 2010-2014 Untuk Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana;
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 15/PER/MENTERI PP.PA/ Tahun 2010 Tentang Rencana Strategis Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2010-2014; dan

@ Hak cipta milik UIN Sunha Jambi

State Islamic University of Sunthan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAMIAH
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak mengizinkan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022. (Dokumen Rencana Strategis DPMPPPA Kota Jambi).

Rencana Strategis (Renstra) bersifat dokumen jangka menengah dan mempunyai peran yang sangat penting terutama dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) setiap tahunnya, sebagai dasar penilaian kinerja pimpinan Satuan Kerja. Rencana kerja (Renja) adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerja regulasi dan kerangka anggaran. Rencana kerja (Renja) merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu tahun. Rencana Kerja (Renja) sebagai pedoman kerja selama periode satu tahun dan berfungsi menterjemahkan perencanaan startegis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. DPAAPP Kota Jambi berkewajiban menyusun Rencana Kerja (Renja) yang berpedoman pada Rencana Startegis (Renstra). Rencana Kerja (Renja) diantaranya memuat: program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pagu indikatif dan prakiraan maju.

Dalam rangka mencapai visi dan misi Rencana Startegis (Renstra) Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kota Jambi tahun 2017-2022, maka selanjutnya tertuang dalam Rencana Kerja (Renja) Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Jambi yang direalisasikan melalui beberapa program kegiatan pada tahun 2018, sebagai berikut:



1. Kajian pengembangan TTG dengan lembaga pemerhati TTG
2. Perkuatan posyantek di Kota Jambi;
3. Pengembangan Posyantek
4. Lomba cipta TTG tingkat SLTA dan perguruan tinggi;
5. Peningkatan kreativitas kader posyantek dan wartek;
6. Rakortek pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna;
7. Pengembangan TTG unggulan;
8. Temu konsultasi pengurus posyantek;
9. Advokasi atau sosialisasi pengembangan posyantek dan wartek;
10. Pembinaan pengurus posyantek dan wartek;
11. Pengembangan posyantek percontohan
12. Pemberdayaan masyarakat pesisir dalam pengelolaan hutan mangrove lestari;
Pendampingan posyantek dan wartek;
13. Pengembangan keterampilan TTG bagi masyarakat pengguna TTG yang mandiri; dan
14. Penilaian posyantek kecamatan.

Secara teknis teknologi tepat guna merupakan jembatan antara teknologi tradisional dan teknologi maju. Dalam proses pengalihan teknologi tepat guna kerap ditemukan adanya kesenjangan yang cukup besar antara pemberi teknologi dengan masyarakat sebagai penerima teknologi. Mengingat faktor-faktor tersebut dan



adanya keterbatasan modal maka dalam proses alih teknologi kepada masyarakat diperlukan bantuan berbagai pihak yang berkepentingan,

hal ini sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan Ibu Fairozs, ST selaku Kasi Teknologi Tepat Guna, beliau mengatakan bahwa:²⁹

“Masyarakat pada saat ini tidak begitu memahami terkait pemanfaatan teknologi tepat guna, masih banyak masyarakat yang beranggapan bahwa teknologi tepat guna ini adalah bentuk teknologi yang layaknya seperti teknologi modern seperti gadget dan yang lainnya, hal ini yang menjadikan masyarakat kurang mempunyai inovasi terkait teknologi tepat guna ini, maka dari itu disini kami dari dinas pemberdayaan masyarakat memberikan sosialisasi terkait inovasi teknologi tepat guna dan manfaatnya bagi mereka”

Seperti yang dikatakan oleh Ibu Rosdalia, SH selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat DPPMPPA, beliau mengatakan sebagai berikut:³⁰

“Rencana strategis yang dilakukan DPPMPPA untuk masyarakat lebih mengenal posyantek karena masyarakat masih banyak yang belum tau posyantek itu apa. Kita dari DPPMPPA sudah mencoba memasang banner di setiap kecamatan Kota Jambi biar masyarakat bertanya tanya apa itu posyantek. Karena masyarakat lebih mengenal posyandu di banding posyantek, padahal jika implementasi program posyantek berjalan dengan baik bisa menumbuhkan tingkat ekonomi di Kota Jambi. Dari skala kelurahan dengan adanya wartek (warung teknologi) lalu sampai ke tingkat Kota. Pembinaan DPPMPPA tetap ada, namun bersifat global jadi hasil binaan dari KPMP diangkat ke Kota baru kami mengevaluasi untuk menentukan usulan lomba nasional.”

Ketentuan di atas dibuat sebagai acuan dan indikator yang harus dipenuhi guna melakukan pendampingan kepada masyarakat untuk membentuk masyarakat yang mandiri dengan penemuan dan karya yang inovatif. Mampu mengembangkan masyarakat yang produktif dalam mengembangkan teknologi yang bermanfaat.

²⁹ Wawancara bersama Ibu Fairozs, ST KASI Teknologi Tepat Guna 28 Agustus 2022

³⁰ Wawancara bersama Ibu Rosdalia, SH KABID Pemberdayaan Masyarakat 02 September 2022

B. Regulasi Pendampingan Teknologi Tepat Guna Masyarakat Kota Jambi

upaya untuk mempercepat pemulihan Ekonomi Nasional serta mempercepat kemajuan desa dan menghadapi persaingan global dipandang perlu melakukan percepatan Pembangunan perdesaan melalui pemberdayaan Masyarakat di berbagai bidang yang didukung oleh penerapan dan pengembangan Teknologi Tepat Guna.

Mengenai menanggulangi kemiskinan pemerintah membuat kebijakan-kebijakan untuk mengurangi kemiskinan salah satunya yang dibuat oleh Pemerintah adalah Pos Pelayanan Teknologi (posyantek) adalah lembaga kemasyarakatan di kecamatan yang memberikan pelayanan teknis, informasi dan orientasi jenis TTG. Warung Teknologi (Wartek) lembaga kemasyarakatan didesa/kelurahan yang memberikan pelayanan teknis, informasi dan orientasi berbagai jenis TTG. Desa atau yang sering di sebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Teknologi Tepat Guna dapat menjawab permasalahan masyarakat, tidak



merusak lingkungan dapat dimanfaatkan dan dipelihara oleh masyarakat secara mudah serta menghasilkan nilai tambah dari aspek ekonomi dan aspek lingkungan.

Pengembangan kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi tujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk mengaitkan fungsi, manfaat dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada atau menghasilkan teknologi.

Teknologi Tepat Guna yang selanjutnya disebut TTG adalah teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dapat menjawab permasalahan masyarakat, tidak merusak lingkungan, dapat dimanfaatkan dan dipelihara oleh masyarakat secara mudah, serta menghasilkan nilai tambah dari aspek ekonomi dan aspek lingkungan. Posyantek itu lembaga berdirinya berdasarkan dari undang-undang

Kementrian Dalam Negri Nomor 20 Tahun 2010 pemberdayaan masyarakat melalui TTG yang lebih kenal sebagai posyantek. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Fairozs, ST selaku Kasi Teknologi Tepat Guna, beliau mengatakan bahwa:³¹

“Di DPPMPPA ini mengikuti instruksi dan perintah dari Walikota Kota Jambi, dan untuk posyantek ini tujuannya adalah masyarakat untuk lebih mengenal teknologi. Sebelumnya memakai manual lalu setelah adanya posyantek ini bisa memakai alat yang lebih meringankan atau memudahkan masyarakat.”

Tujuan Pemberdayaan masyarakat melauai pengelolaan Teknologi Tepat Guna untuk:

1. Meningkatkan kemandirian dan daya saing mutu/kualitas produk daerah dan nasional melalui pemanfaatan/penggunaan TTG.

³¹Wawancara bersama Ibu Fairozs, ST KASI Teknologi Tepat Guna 28 Agustus 2022

2. Menumbuh kembangkan kemampuan dan/atau inovasi masyarakat dalam pengembangan dan implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dalam pembangunan daerah
3. Menciptakan kesempatan kerja baru
4. Menjalankan dan meningkatkan kerja sama dalam pengembangan dan pemanfaatan TTG.³²

DPMPPPA Kota Jambi dalam memberikan pembinaan lebih mengarah pada pemberian pelayanan kepada masyarakat dan lebih mengenalkan kepada masyarakat tentang TTG. DPMPPPA memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan yang ada dimasyarakat. Sehingga setelah adanya pelatihan–pelatihan yang diberikan oleh Pemerintah, masyarakat dapat mengimplementasikannya dilingkungannya. Dalam Renstra tersebut, telah dijelaskan arah pemberdayaan yang harus dilakukan oleh Kota Jambi, namun pada pelaksanaannya DPMPPPA melakukan pembinaan lebih kepada pemberian pelayanan untuk masyarakat Berikut beberapa program kegiatan yang telah dilaksanakan oleh DPMPPPA pada tahun 2017-2022 yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) DPMPPPA Kota Jambi, yang tertuang pada Rencana Kerja (Renja) Kota Kota Jambi, antara lain :

1. Kegiatan Pelatihan TTG pada Tahun 2018
 - a. Tujuan

³² Peraturan Menteri Dalam Negeri, No.20 Tahun 2010, Pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan teknologi tepat guna.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
 1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

- 1) Meningkatkan pengetahuan dan wawasan masyarakat tentang perkembangan inovasi teknologi serta manfaatnya dalam rangka peningkatan kualitas hidup;
 - 2) Diketuinya berbagai jenis alat teknologi tepat guna dan produknya secara visual oleh masyarakat sehingga masyarakat pengguna dapat memperoleh informasi yang cukup untuk menetapkan pilihan;
 - 3) Termotivasinya masyarakat untuk menggunakan TTG sesuai dengan kebutuhan masing-masing;
2. Kegiatan Sosialisasi Posyantek Kepada Pengurus Posyantek atau Wartek dan Aparat di Kota Jambi Tahun 2018
 - a. Tujuan
 - 1) Menyamakan persepsi dalam menyusun program kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan;
 - 2) Mencari keterpaduan dan keselarasan program kerja dan kegiatan yang akan diusulkan dalam tahun anggaran berikutnya;
 - 3) Mencari format rencana kerja dan tindak lanjut program kerja dan kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan di bidang teknologi tepat guna dalam rangka pemberdayaan masyarakat; dan
 3. Menyajikan Laporan Program Kerja dan Kegiatan 2017-2022
 - a. Tujuan
 - 1) Mempertemukan pengurus posyantek dengan para pembina, baik dengan camat selaku pembina, pembina tingkat Kota dan pembina

tingkat Kota, untuk mewujudkan kerjasama, koordinasi dan komunikasi yang harmonis;

- 2) Mengetahui masalah dan kendala yang dihadapi oleh pengurus posyantek dan memberikan upaya pemecahan masalah, sehingga TTG dapat dimanfaatkan, dikembangkan dialih teknologikan sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakat.

4. Meningkatkan Kinerja Posyantek sebagai Pelayanan Teknis

a. Tujuan

- 1) Mengkonsolidasikan tugas dan tanggung jawab serta wewenang aparat dan posyantek meliputi pengurus posyantek, pengurus wartek, aparat terkait di kecamatan dan kelurahan;
- 2) Memperkuat komitmen pengurus posyantek, pengurus wartek, dan aparat terkait di kecamatan dan kelurahan dalam rangka pengelolaan dan pengembangan posyantek kedepan; dan
- 3) Mensinergikan program kerja posyantek anatara pengurus posyantek atau wartek denga aparat instansi terkait.

5. Kegiatan Pendampingan Posyantek dan Wartek di Kota Jambi.

a. Tujuan

- 1) Mengetahui masalah dan kendala yang dihadapi oleh pengurus posyantek dan memberikan upaya pemecahan masalah, sehingga TTG dapat dimanfaatkan, dikembangkan dialih teknologikan sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakatan;

- 2) Memberikan pendampingan sehingga terjadi kemandirian dalam penerapan TTG di masyarakat;
- 3) Memotivasi pengurus atau kader posyantek dan wartek untuk terus berinovasi dalam pengembangan TTG sesuai dengan potensi daerah;
- 4) Mensosialisasikan pentingnya HAKI untuk proteksi alat atau produk TTG yang dimiliki; dan Memberikan rekomendasi dalam usaha pemasaran alat atau produk TTG yang dimiliki.

Hal ini sesuai dengan wawancara peneliti dengan Ibu Fairozs, ST selaku Kasi di bidang teknologi tepat guna, beliau mengatakan bahwa:³³

“Teknologi tepat guna itu dibutuhkan untuk memajukan perekonomian masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya yang ada baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya alam, kebutuhan masyarakat itu merupakan prioritas yang harus dilakukan pemerintah, akan tetapi juga masyarakat harus punya kesadaran terkait kebutuhan mereka sendiri. Maksudnya masyarakat harus punya inovasi terkait apa yang dibutuhkan mereka, dan kami pemerintah akan membantu dengan memberikan arahan bagaimana cara memanfaatkan inovasi yang mereka punya.”

Melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kota Jambi, Kegiatan Pendampingan Teknologi Tepat Guna (TTG) dan Bimbingan Teknis Posyantek dilaksanakan. Dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat karena dapat menambah lapangan kerja, dan menambah produktivitas masyarakat serta meningkatkan partisipasi masyarakat.

³³ Wawancara bersama Ibu Fairozs, ST KASI Teknologi Tepat Guna 28 Agustus 2022

Seperti yang dikatakan oleh Bapak Alfian selaku Staf di bidang Teknologi tepat guna, beliau mengatakan bahwa:³⁴

“DPMPPPA melakukan pembinaan bukan hanya kepada pengurusnya tetapi juga kepada masyarakatnya, melalui pengurusnya DPMPPPA memberikan pembinaan untuk melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat. misalnya posyantek disitu memfasilitasi masyarakat, memberi masukan atau cara terbaru untuk melakukan yang lebih mudah dan simple kepada masyarakat yang dia tidak mengerti tentang kemas, posyantek menyiapkan masyarakat yang butuh dibina. Intinya pembinaan diberikan menyesuaikan dengan kegiatan– kegiatan yang ada.”

Untuk lebih jelas mengenai pendampingan yang dilakukan oleh DPPMPPA, dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:



³⁴ Wawancara bersama Bapak Alfian, Staf Teknologi Tepat Guna Pemberdayaan Masyarakat 27 Agustus 2022

Tabel 3
Pemberdayaan Masyarakat Teknologi Tepat Guna

Kegiatan	Indikator Kinerja	Sasaran	Target	Hasil
Pelatihan Teknologi tepat guna	Pengaktifan posyantek kecamatan	73 Anggota Posyantek sekecamatan	Menambah ilmu dibidang teknologi tepat guna	Termotivasi dalam berinovasi di bidang teknologi tepat guna
Lomba Alat Teknologi Tepat Guna Tingkat Kota Jambi	Alat dan Posyantek Aktif.	11 Posyantek se-Kota Jambi	6 Pemenang	Menjadi Ajang promosi alat Teknologi Tepat guna
Lomba Teknologi Tepat Guna Balitbangda Tingkat Provinsi Jambi	Alat dan Posyantek Aktif.	6 alat Posyantek kota jambi	2 Pemenang	Menjadi Ajang promosi alat Teknologi Tepat guna



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asal;
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suftaha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suftaha Jambi

Lomba Teknologi Tepat Guna Tingkat provinsi Jambi dinas DP3AP2	Alat dan Posyantek Aktif.	2 Posyantek Kota jambi	1 Pemenang	Menjadi Ajang promosi alat Teknologi Tepat guna
Pameran/Gelar Teknologi Tepat Guna Tingkat Provinsi Jambi	Inovasi TTG	Inovasi alat Teknologi Tepat guna	Memperkenalkan Inovasi Teknologi tepat guna se-kota jambi	Menambah Motivasi dan kreativitas Inovasi Alat TTG
Pameran/Gelar Teknologi Tepat Guna Tingkat Nasional	Inovasi TTG	Inovasi alat Pemenang Teknologi Tepat guna	Memperkenalkan Inovasi Teknologi tepat guna provinsi jambi	Menambah Motivasi dan kreativitas Inovasi Alat TTG
Sosialisasi dari Walikota kepada Kasi PMK Kecamatan dan PMK kelurahan se-Kota Jambi	Mengaktifkan Kembali Posyantek Kecamatan	Kepada Kasi PMK Kecamatan dan kelurahan se Kota Jambi		Menambah Ilmu tentang Teknologi Tepat Guna.

Pelaksanaan program-program pembinaan posyantek yang dilakukan oleh DPMPPPA dibebankan pada APBD Kota Jambi setiap tahunnya. Mengacu pada tugas dan kegiatan dari posyantek dan pembinaan yang telah dilakukan oleh DPMPPPA, sumber-sumber pendanaan kegiatan posyantek dapat berasal dari sebagai berikut:

1. APBD Kabupaten/ Kota,
APBD Kabupaten/ Kota digunakan untuk membiayai kegiatan inventarisasi, sosialisasi atau desiminasi informasi TTG, pengembangan TTG, dan pelatihan masyarakat, serta administrasi dan pemantauan Tim Pembina Kabupaten/ Kota.
2. APBD Kota
APBD Kota digunakan untuk membiayai operasional kegiatan administrasi, pemantauan dan pembinaan tim pembina Kota.
3. Bantuan dari pihak lain yang tidak mengikat
Bantuan dapat bersumber dari lembaga, perusahaan atau pihak lain baik dari dalam maupun luar negeri.
4. Usaha produktif yang mungkin bisa dikembangkan:
 - a. Membuka bengkel atau perbaikan TTG;
 - b. Menyelenggarakan kursus atau pelatihan TTG;
 - c. Menyediakan TTG yang dibutuhkan oleh masyarakat;
 - d. Jasa pelayanan konsultasi;
 - e. Hasil komisi atas penjualan barang dan kegiatan lain yang diatur dalam ketentuan sendiri;



- f. Royalti atas HAKI yang dimiliki posyantek; dan
- g. Kegiatan usaha lain yang tidak melanggar hukum

Hal-hal yang perlu mendapat perhatian dalam rangka pengelolaan dana adalah sebagai berikut:

1. Dana yang dimiliki posyantek harus dikelola secara transparan dan dapat dipertanggung jawabkan;
2. Setiap pengeluaran harus direncanakan dan disepakati melalui musyawarah;
3. Setiap pemasukan dan pengeluaran dana harus dicatat dalam buku kas harian oleh bendahara;
4. Bila lokasi posyantek dekat dengan lembaga keuangan atau bank, sebaiknya sebagian besar dana posyantek disimpan di bank;
5. Setiap bulan sekali bendahara melaporkan perkembangan keuangan kepada pengurus dalam rapat pengurus; dan setiap sebulan sekali pengurus harus melaporkan perkembangan keuangan kepada Bupati atau WaliKota.

Seperti yang dikatakan oleh Bapak Sujianto selaku Ketua Posyantek Jelutung, beliau mengatakan bahwa:³⁵

“Bentuk alokasi dananya melalui swadaya sendiri atau pengurus sendiri, sudah tidak ada lagi dana untuk posyantek ini dan tidak ada perda yang kuat. Kalau dulu ada misalkan kelompok masyarakat membutuhkan alat pancacak sampah, melalui ketua posyantek memfasilitasi lewat pemerintah Kota atau kabupaten bisa juga dengan CSR, tapi itu dulu sekarang sudah tidak bisa. Mungkin saja bisa lewat CSR tetapi lewat pemda atau pemkot sekarang sudah tidak ada bentuk dana untuk posyantek.”

³⁵ Wawancara bersama Bapak Sujianto Ketua Posyantek Jelutung 01 September 2022

C. Kebijakan Pendampingan Teknologi Tepat Guna pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi

Sasaran dalam program Posyantek dalam pemberdayaan masyarakat suatu bagian dari upaya yang ingin menjadikan teknologi sebagai alat pemerataan pembangunan ekonomi. Posyantek sebagai alat informasi pendekat atau menjembatani masyarakat pengguna teknologi dan sumber teknologi harus dikembangkan sebagai pelayanan publik dalam bidang jasa informasi dan penyedia teknologi tepat guna bagi masyarakat agar mandiri, dan profesional.

Pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG diarahkan pada pemanfaatan dan pengembangan TTG sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan permasalahan daerah. Menurut Peraturan Walikota Kota Jambi Nomor 15 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Teknologi Tepat Guna melalui Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna dan Evaluasi Kegiatan TTG Kota Jambi.

1. Sasaran produksi Mikro, Kecil dan Menengah untuk meningkatkan mutu produk yang dihasilkan industri mikro, kecil dan menengah agar mampu bersaing dipasar nasional.
2. Sasaran lingkungan untuk mengendalikan kerusakan lingkungan melalui teknologi pemanfaatan limbah, teknologi penanggulangan pencemaran, teknologi penyediaan air bersih dan sumber energi alternatif yang ramah lingkungan.
3. Sasaran sosial kemasyarakatan untuk menciptakan keamanan, ketertiban dan kenyamanan dalam bermasyarakat.



4. Sasaran teknologi informasi untuk komunikasi yang efektif berbasis komputer seperti internet, alat komunikasi lainnya untuk peningkatan pelayanan masyarakat dan promosi produksi usaha mikro, kecil dan Menengah.
5. Sasaran teknologi lainnya pada penggalian dan pengembangan teknologi

Sesuai dengan potensi dan kebutuhan daerah untuk peningkatan ekonomi masyarakat dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan berjalannya pembinaan posyantek yang dilakukan DPMPPPA sebagai cara untuk pemberdayaan masyarakat. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Fairozs, ST selaku Kasi Teknologi Tepat Guna, beliau mengatakan bahwa:³⁶

“DPMPPPA dan Posyantek harus saling menjaga komunikasi biasanya kita dari DPMPPPA mengadakan forum ketua posyantek se-Kota Jambi agar kita tahu apa yang kurang dan dibutuhkan. Selain itu juga mengadakan monitoring untuk melakukan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kultru lingkungan dan budayanya. Setelah kita mengadakan forum pasti melihat yang mana posyantek yang lagi aktif dan membuat inovasi-inovasi terbaru. Setelah itu kita lihat tahap selanjutnya dan kita bakal mengikut sertakan posyantek tersebut di event daerah maupun nasional. Setiap tahunnya pasti ada posyantek yang membuat inovasi terbaru dari sumberdaya yang ada.”

Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek) dapat membantu masyarakat dalam menemukan hasil karya terbaru dan pengembangan teknologi. Hampir semua posyantek yang ada di KOTA Jambi lebih mengarah ke lingkungan atau daur ulang sampah, memanfaatkan kreatifitas masyarakat sumberdaya yang ada. Berbagai jenis dan ragam teknologi tepat guna sudah dikembangkan oleh berbagai pihak. alat-alat TTG dirancang dan disesuaikan dengan kebutuhan, potensi sumber daya alam dan kemampuan masyarakat penggunaannya sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal.

³⁶ Wawancara bersama Ibu Fairozs, ST KASI Teknologi Tepat Guna 28 Agustus 2022

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara peneliti kepada bapak sujianto selaku ketua posyantek Jelutung, beliau mengatakan bahwa:³⁷

“Kegiatan teknologi tepat guna sudah kami ikuti dari tahun ke tahun sesuai dengan arahan dan pembinaan dari dinas pemberdayaam masyarakat kota itu, kami terutama saya sebagai ketua sudah memberikan beberapa inovasi teknologi tepat guna seperti alat pengering makanan, alat pengubah limbah menjadi pupuk organik dan yang lainnya.”



Gambar. 3. Alat pengolah limbah menjadi pupuk organik/Kompos

³⁷ Wawancara bersama Bapak Sujianto Ketua Posyantek Jelutung 01 September 2022

Salah satu alat yang berhasil diciptakan oleh posyantek Jelutung yakni Pengolah Limbah menjadi pupuk Organik, Proses pengomposan membutuhkan waktu selama lebih kurang 40 hari. Proses pembuatannya berawal dengan mengumpulkan sampah dari masyarakat. Sampah yang sudah terkumpul harus dipastikan jenisnya, jenis yang dapat digunakan untuk membuat kompos adalah jenis sampah organik, sehingga sampah yang akan diproses menjadi kompos harus bersih dari limbah plastik.

Proses pembuatan pupuk organik diawali dengan memasukkan sampah organik ke dalam ember, kemudian dilanjutkan dengan memasukkan Tanah, dilanjutkan sampah organik dan ditutup dengan Tanah. Kemudian sampah organik dan tanah dicacah atau dicampurkan menjadi satu. Langkah selanjutnya setelah sampah organik dan tanah tercampus yaitu mengaktifkan aktivator EM4 dengan memberikan air dan gula dalam wadah semprotan dan diaduk. Kemudian, EM4 disemprotkan kedalam ember yang sudah diisi sampah organik dan Tanah, Setelah itu ember didiamkan selama 4-6 minggu.

aktivator EM4 merupakan bahan yang mengandung beberapa mikroorganisme yang sangat bermanfaat dalam proses pengomposan. Manfaat EM4 sendiri dapat meningkatkan fermentasi limbah dan sampah organik, meningkatkan ketersediaan unsur hara untuk tanaman, serta menekan aktivitas serangga dan hama

Pupuk kompos yang telah didiamkan selama 4-6 minggu tersebut, kemudian dikeluarkan dari wadahnya dan dilanjutkan proses pengeringan, dengan cara



penghamparan pada selebar terpal yang sudah disiapkan. Pengeringan cukup menggunakan sinar matahari. Proses pengeringan membutuhkan waktu lebih kurang 10-15 hari. Pupuk yang sudah kering dapat dipastikan dengan cara menggenggam kompos tersebut, kemudian membuka genggamannya. Jika kondisi pupuk tidak menggumpal ketika genggamannya dibuka, maka pupuk kompos tersebut sudah dapat digunakan. Untuk hasil terbaik, pupuk kompos tersebut juga dapat di ayak untuk mendapatkan butiran yang lebih halus dan homogen.

Fungsi alat teknologi tepat guna disini yakni sebagai pencacah antara sampah organik dan tanah agar tercampur merata. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Sujianto selaku Ketua Posyantek Jelutung, beliau mengatakan bahwa:³⁸

“Penggunaan alat teknologi tepat guna ini ditujukan dengan membantu masyarakat dalam mengurangi beban dari waktu dan juga tenaga yang dikeluarkan contohnya ya alat pengolah limbah organik ini, dengan alat ini masyarakat tidak perlu lagi mencacah tanah dan sampah organik dengan tangan kosong, itu hanya membuat waktu kita terbuang banyak, dengan alat ini kita bisa membuat waktu kita menjadi lebih efisien”

³⁸ Wawancara bersama Bapak Sujianto Ketua Posyantek Jelutung 01 September 2022





Gambar. 4. Pupuk Organik/Kompos

Dengan adanya Teknologi seperti ini masyarakat tidak perlu lagi bersusah payah membeli pupuk tanaman dengan harga yang mahal, dengan ini tergambarlah peran teknologi tepat guna itu bisa sangat membantu jika masyarakat dapat memahami kegunaan dan pemanfatannya.

@ Hak cipta milik UIN Sunha Jambi

State Islamic University of Sunthan Thaha Saifuddin Jambi



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Hasil Penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

Syarat dan Ketentuan dalam Pendampingan Teknologi tepat guna ialah sesuai dengan Instruksi Presiden No.3 Tahun 2001 tentang Penerapan dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna, sebagai mana yang dinyatakan bahwa Pemerintah melalui Dinas terkait dalam melakukan pendampingan kepada masyarakat wajib dilaksanakam dengan ketentuan:

1. Kerjasama dengan lembaga lain dalam penerapan dan pengembangan TTG
2. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program Pengembangan TTG
3. Memfasilitas penguatan kelembagaan pelayanan teknologi dalam Pengembangan TTG

Regulasi Pendampingan Teknologi Tepat guna dilakukan dengan merujuk pada peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna, yang menyatakan Bahwa Pemberdayaan masyarakat adalah upaya pengembangan masyarakat melalui penciptaan kondisi yang memungkinkan masyarakat mampu membangun diri dan lingkungannya secara mandiri melalui pemberian sumberdaya, kesempatan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat. Teknologi Tepat Guna yang selanjutnya disebut TTG adalah teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dapat menjawab permasalahan masyarakat, tidak merusak lingkungan, dapat

dimanfaatkan dan dipelihara oleh masyarakat secara mudah, serta menghasilkan nilai tambah dari aspek ekonomi dan aspek lingkungan.

Kebijakan Pendampingan Teknologi Tepat Guna dilakukan dengan Tujuan untuk Memenuhi sasaran sebagai Berikut:

1. Sasaran produksi Mikro, Kecil dan Menengah untuk meningkatkan mutu produk yang dihasilkan industri mikro, kecil dan menengah agar mampu bersaing dipasar nasional.
2. Sasaran lingkungan untuk mengendalikan kerusakan lingkungan melalui teknologi pemanfaatan limbah, teknologi penanggulangan pencemaran, teknologi penyediaan air bersih dan sumber energi alternatif yang ramah lingkungan.
3. Sasaran sosial kemasyarakatan untuk menciptakan keamanan, ketertiban dan kenyamanan dalam bermasyarakat.
4. Sasaran teknologi informasi untuk komunikasi yang efektif berbasis komputer seperti internet, alat komunikasi lainnya unyuk peningkatan pelayanan masyarakat dan promosi produksi usaha mikro, kecil dan Menengah.
5. Sasaran teknologi lainnya pada penggalian dan pengembangan teknologi



B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan dan pembahasan sebelumnya, maka penulis ingin memberikan beberapa saran antara lain:

1. Bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kota Jambi sebaiknya dalam melakukan sosialisasi seharusnya dilakukan dengan lebih menjelaskan kearah yang lebih menarik sehingga masyarakat bisa memiliki banyak inovasi-inovasi teknologi tepat guna yang baru.
2. bagi Ketua Posyantek dan Dinas Terkait, sebaiknya lebih meningkatkan hubungan kerjasama sehingga dalam menciptakan inovasi teknologi tepat guna bisa menjadi gambaran baik untuk masyarakat turut serta dalam pembangunan inovasinya.



DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

- Lexy J. Moleong, (2006) *Metode penelitian Kualitatif Edisi Refisi*, Bandung: PT Remaja. RosudaKarya.
- Iin Tri Rahayu, (2004) *Observasi dan wawancara*, JawaTimue: Bayu media Publishing,
- M. Syamsudin, (2007) *Operasional Penelitian Hukum*, Jakarta; PT Raja Grafindo Persada,
- Dudung Abdurrahman, (2002) *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga
- Sugiono, (2014) *Memahami Penelitian Kualitatif* Bandung : Alfabeta
- Isbandi Rukminto Adi, (2008) *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*, Jakarta: PT Grafindo Persada
- Sugiyono, (2015), “*Metode Penelitian Kuantitati, Kualitatif dan R&D*”, Bandung: Alfabeta
- Edi Suharto, (2011) *Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta,

B. Jurnal/Skripsi

- Riza Fauziah, (2020) “*Partisipasi Masyarakat Dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna (Posyantek)*”, Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta:
- Mira Rusmalinta, (2021) “*Dampak Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam Pertanian Terhadap Perubahan Sosial Keagamaan Masyarakat Petani*”, Skripsi UIN Raden Intan, Lampung



Nurul Izzati, (2021) “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program POSYANTEKDES (Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Desa)”, Skripsi

UIN Sultan Syarif Kasim, Riau

Gede Eka Dharma Antara, “Peningkatan Inovasi Teknologi Tepat Guna dan Program BerbasisPemberdayaan Masyarakat untuk Memajukan Industri Kreatif di Bali”, *Jurnal Pasti*, Vol.9 No.3,

C. Undang-Undang

Peraturan Menteri desa, Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa


Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2001, Tentang Penerapan dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna

Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 20 Tahun 2010, Tentang Pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan teknologi tepat guna.



LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Riset

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Lintas Jambi-Muaro Bulian KM. 16 Simpang Sungai Duren Kab. Muaro Jambi 36363
Telp/ Fax : (0741) 583183 - 584118 website : www.iainjambi.ac.id

Nomor : B-3639 /D.II.1/PP.00.11/6/2022
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Jambi, 28 Juni 2022

Kepada Yth.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Jambi
Di -
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb


Sehubungan dengan keperluan persyaratan penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Syariah UIN STS Jambi, maka diperlukan data sesuai dengan bidang penelitian yang bersangkutan, dari itu mohon kiranya dapat menerima mahasiswa tersebut pada instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin. Adapun nama mahasiswa yang dimaksud adalah:

Nama : **Muhammad Naufal Alfikri**
NIM : 105180058
Semester/Jurusan : VIII / Ilmu Pemerintahan
Tahun Akademik : 2021/2022
Judul Skripsi : **Kebijakan Pemerintah dalam Pendampingan Teknologi Tepat Guna di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi.**

Lokasi Penelitian : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi
Waktu Penelitian : 28 Juni 2022 – 28 Agustus 2022

Atas kerjasama yang baik dan izin yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu alaikum Wr.Wb


An. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik Dan Kelembagaan
Agus M. Sidiq, M.A., M.I.R., Ph.D
80817 200901 1 009

Tembusan :

1. Yth. Dekan Fakultas Syariah UIN STS Jambi
2. Yth Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan
3. Arsip

Lampiran 2 Data Informan

No	Nama	Keterangan
1	Rosdalia, SH.	Kabid Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
2	Fairozs, ST	Kasi Teknologi Tepat Guna
3	Alfan Faisal	Staf Teknologi Tepat Guna
4	Sujianto	Ketua Posyantek Ojo Lali Kec. Jelutung

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

Lampiran 3 Instrumen Pengumpulan Data

Judul Skripsi :

Kebijakan Pemerintah Dalam Pendampingan Teknologi Tepat Guna di Dinas Pemberdayaa Masyarakat Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi

Wawancara Riset :

1. Daftar Pertanyaan Untuk Lembaga Pemerintah

- 1) Apa saja kebijakan yang telah dilakukan dinas pemberdayaan masyarakat pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam melakukan pendampingan teknologi tepat guna?
- 2) Sejak Kapan dinas pemberdayaan masyarakat pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak memegang wewenang dalam pendampingan teknologi tepat guna?
- 3) mengapa dalam kegiatan teknologi tepat guna itu diperlukan pendampingan?
- 4) siapa saja yang berkaitan langsung dalam pendampingan teknologi tepat guna di kota jambi?
- 5) Apa yang menjadi landasan/regulasi dinas pemberdayaan masyarakat pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam melakukan pendampingan teknologi tepat guna?
- 6) apa saja kendala yang dihadapi dinas pemberdayaan masyarakat pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam melakukan pendampingan teknologi tepat?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- 7) Bagaimana upaya dinas pemberdayaan masyarakat pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk menangani masalah yang ada dalam pendampingan teknologi tepat guna?
- 8) Apakah pemerintah memberikan anggaran kepada penyelenggara program teknologi tepat guna?
- 9) Apa yang menjadi prioritas utama dalam melakukan pendampingan teknologi tepat guna?
- 10) Apa saja pencapaian yang telah diperoleh selama pelaksanaan pendampingan teknologi tepat guna?
- 11) Berapa kali dalam sebulan pendampingan teknologi tepat guna itu dilakukan?
- 12) bagaimana hubungan kerjasama antara dinas DPMPPA sebagai pendamping dan masyarakat pengembang teknologi tepat guna?
- 13) Bagaimana tingkat pencapaian program teknologi tepat guna dengan adanya pendampingan ini?
- 14) apakah pendampingan yang dilakukan dinas pemberdayaan masyarakat pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak memberi dampak positif terhadap pengembangan teknologi tepat guna?
- 15) Apa peran yang dilakukan kecamatan selama masa pendampingan?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

2. Daftar Pertanyaan Untuk Masyarakat

- 1) bagaimana tanggapan masyarakat posyantek terkait kinerja dinas pemberdayaan masyarakat pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam pendampingan teknologi tepat guna?
- 2) bagaimana pendampingan yang dilakukan dinas DPMPPA dalam pengembangan teknologi tepat guna di posyantek?
- 3) Apakah posyantek dalam menjalankan program teknologi tepat guna mendapat bantuan anggaran dari pemerintah?
- 4) Apakah setelah adanya pendampingan, posyantek bisa lebih meningkatkan kinerja dalam pengembangan alatnya?
- 5) Apa produk yang difokuskan dalam pendampingan teknologi tepat guna ini?
- 6) apa manfaat dan tujuan dari alat teknologi tempat guna yang di buat?
- 7) Bagaimana menurut bapak/ibu terhadap partisipasi pemerintah dalam pembinaan teknologi tepat guna?
- 8) Apakah dinas DPMPPA Berperan baik Dalam pendampingan teknologi tepat guna?
- 9) apakah ada kendala yang dihadapi bapak/ibu dengan adanya pendampingan teknologi tepat guna ini?
- 10) Apa dampak positif yang diterima bapak/ibu dalam menerima pembinaan teknologi tepat guna?

Lampiran 4 Dokumentasi



@ Hak cipta milik UIN Sunha Jambi

State Islamic University of Sunthan Thaha Saifuddin Jambi



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi



@ Hak cipta milik UIN Sunha Jambi



State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagaiian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi



@ Hak cipta milik UIN Sunha Jambi

State Islamic University of Sunthan Thaha Saifuddin Jambi



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi



@ Hak cipta milik UIN Suttha Jambi



State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suttha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suttha Jambi

CURICULUM VITAE



A. Identitas Diri

Nama : Muhammad Naufal Alfikri
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat/Tgl. Lahir : Jambi, 02 oktober 2000
NIM : 105180058
Fakultas/Prodi : Syariah, Ilmu Pemerintahan
Universitas : UIN Sultan Thaha Saifudin Jambi
Alamat : Perumahan Puri Masurai Blok C.22 RT. 43 Talang Bakung Jambi
No Telp/HP : 082177916075
Email : Muhammadnaufalalfikri11@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

- MIN Model Kota Jambi (Tahun 2012)
- MTsN Model Kota Jambi (Tahun 2015)
- MAN Negeri 2 Kota Jambi (Tahun 2018)

C. Pengalaman Organisasi

- Pramuka dari MIN-MAN 2 Kota Jambi